



RENCANA KERJA

2025

**DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**

KATA PENGANTAR

Sebagai Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 kembali menyusun Rencana Kerja Tahunan yang disusun dengan mempedomani Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025 dan merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 lingkup Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 memuat Program-program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan. Nomenklatur Program, kegiatan dan Sub kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 telah mengacu kepada nomenklatur program, kegiatan dan sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan dan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2022 tentang Hasil verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025, saran-saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka yang lebih baik lagi untuk dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT meridhoi segala usaha dan upaya kita bersama untuk mencapai Kabupaten Bangka yang lebih nyaman untuk semua. Amin.

Sungailiat, Juli 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka,



Drs. H. ASEP SETIAWAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670504 199403 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		v
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2023.....	9
	2.1.1 Realisasi Program /Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan	28
	2.1.2 Realisasi Program /Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan	28
	2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja	33
	2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya /Melebihi Target Kinerja.....	35
	2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra.....	36
	2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan peanggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut	61
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	61
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Analisis Kinerja Pelayanan OPD	79
	2.4 Review terhadap Rancangan AWal RKPD/Renstra OPD.....	82
	2.5 Penelaahaan Usulan Program dan kegiatan masyarakat	101
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH	102
	3.1 Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional	102
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinakerperindag	103
	3.3 Program dan Kegiatan	105
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	107
BAB V	PENUTUP	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)	11
Tabel 2.2	Tabel Program/Kegiatan Yang Melebihi Target	33
Tabel 2.3	Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023	34
Tabel 2.4	Tabel Target dan Capaian sampai tahun 2020	37
Tabel 2.5	Tabel Target dan Capaian sampai tahun 2023	49
Tabel 2.6	Tabel Kriteria Penilaian Relative Kinerja	63
Tabel 2.7	Tabel Realisasi Kinerja PD dan Keuangan PD Per Program Tahun 2023	63
Tabel 2.8	Tabel Capaian Indikator Kinerja Pelayanan	67
Tabel 2.9	Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan PD	68
Tabel 2.10	Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD	83
Tabel 2.11	Tabel Usulan Program dan Kegiatan dan Pemangku Kepentingan Tahun Tahun 2025	101
Tabel 3.1	Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD	104
Tabel 4.1	Tabel Rumusan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, Penyusunan forum Perangkat Daerah, Perumusan rancangan akhir dan penetapan Renja.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025, dilaksanakan dengan mengacu kepada Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,

Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Kabupaten Bangka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 99 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 100);
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);
30. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2025 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinakerperindag Kabupaten Bangka Tahun 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 Lingkup Dinakerperindag Kabupaten Bangka.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika penyusunan Penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2019-2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2023
 - 2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang direncanakan
 - 2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja/Hasil Keluaran yang direncanakan
 - 2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja
 - 2.1.4. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya /melebihi target kinerja
 - 2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra
 - 2.1.6. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD
- 2.5. Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinakerperindag
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu (2023) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2024-2026.

Rencana Kerja Dinakerperindag Kabupaten Bangka adalah penjabaran perencanaan tahunan data kinerja rencana strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinkerperindag ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinakerperindag selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitas dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan Indikator Kinerja. Penetapan Indikator Kinerja ini diikuti dengan Penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pada Tahun 2023 Anggaran Belanja Dinakerperindag Kabupaten Bangka sebesar Rp. 13.352.412.659,00 dengan 1 (satu) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 2 (dua) Urusan Pemerintahan Pilihan, mencakup 10 (Sepuluh) program, 18 (delapan belas) Kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi keuangan sebesar Rp. 10.893.706.943,00 atau 81,59 persen. Dan Pendapatan Asli Daerah dengan Anggaran Rp. 4.391.616.500,00 dengan realisasi Rp. Rp. 4.806.937.300,00 atau 109,46 persen.

Sementara itu pencapaian atas pelaksanaan Tahun Anggaran 2024 dengan total anggaran sebesar Rp. Rp. 27.283.711.918 ,00 dan pendapatan sebesar Rp. 4.464.825.000,00 Untuk pelaksanaan 1 (satu) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 2 (dua) Urusan Pilihan, mencakup 8 (delapan) Program dan 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub Kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian kinerja fisiknya.

Secara umum capaian kinerja Dinakerperindag Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2023 ada yang sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinakerperindag 2019-2023.

Selanjutnya capaian evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)
Kabupaten Bangka

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga kerja, Perindustrian dan Perdagangan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi 9%)		
2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
BIDANG URUSAN TENAGA KERJA		61.518.801.896	25.188.569.302	8.809.903.008	7.200.805.568	81,74	32.389.374.870,00	52,65
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota		30.759.400.948	24.762.050.142	8.421.427.658	6.846.117.164	81,29	31.608.167.306,00	102,76
	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	57.640.000	89.870.412	49.995.000	49.300.800	98,61	139.171.212,00	241,45
	Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	50.120.000	30.000.000	13.665.000	13.665.000	100,00	43.665.000,00	87,12

	Persentase temuan pengelolaan keuangan OPD dalam LHP BPK RI (%)	20.648.266.823	15.588.976.715	6.250.222.063	4.707.541.101	75,32	20.296.517.816,00	98,30
	Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	671.283.800	29.280.000	107.750.000	106.635.878	98,97	135.915.878,00	20,25
	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	5.230.272.350	5.200.173.636	641.178.607	634.271.028	98,92	5.834.444.664,00	111,55
	Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	4.101.817.975	3.823.749.379	1.358.616.988	1.334.703.357	98,24	5.158.452.736,00	125,76
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	57.640.000	89.870.412	49.995.000	49.300.800	98,61	139.171.212,00	241,45
	Persentase Pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	50.120.000	-	13.665.000	13.665.000	100,00	13.665.000,00	27,26
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun (dokumen)	45.000.000	89.870.412	37.355.000	36.660.800	98,14	126.531.212,00	281,18
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	3.160.000	-	3.160.000	3.160.000	100,00	3.160.000,00	100,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	3.160.000	-	3.160.000	3.160.000	100,00	3.160.000,00	100,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	3.160.000	-	3.160.000	3.160.000	100,00	3.160.000,00	100,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	3.160.000	-	3.160.000	3.160.000	100,00	3.160.000,00	100,00

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Kinerja yang disusun (laporan)	45.000.000	30.000.000	8.545.000	8.545.000	100,00	38.545.000,00	85,66
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD (laporan)	5.120.000		5.120.000	5.120.000	100,00	5.120.000,00	100,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	20.648.266.823	15.588.976.715	6.213.622.063	4.673.782.891	75,22	20.262.759.606,00	98,13
	Persentase penatausahaan keuangan yang sesuai standar (%)	-	-	36.600.000	33.758.210	92,24	33.758.210,00	0
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani (bulan)	20.611.666.823	15.588.976.715	6.213.622.063	4.673.782.891	75,22	20.262.759.606,00	98,31
	Jumlah laporan Keuangan yang disusun (laporan)	-	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	24.840.000	-	24.840.000	24.237.760	97,58	24.237.760,00	97,58
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	5.880.000	-	5.880.000	5.720.000	97,28	5.720.000,00	97,28
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	5.880.000	-	5.880.000	3.800.450	64,63	3.800.450,00	64,63

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu (%)	671.283.800	29.280.000	9.750.000	9.670.000	99,18	38.950.000,00	5,80
	Persentase Aparatur yang penilaian kinerjanya baik (%)	-	-	3.000.000	2.906.520	96,88	2.906.520,00	-
	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi (%)	-	-	95.000.000	94.059.358	99,01	94.059.358,00	-
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya yang tersedia (stell)	213.710.000	29.280.000	-	-	-	29.280.000,00	13,70
	Jumlah pakaian olah raga yang tersedia (stel)	78.170.000	-	9.750.000	9.670.000	99,18	9.670.000,00	12,37
	Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia (stell)	158.400.000	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	3.000.000	-	3.000.000	2.906.520	96,88	2.906.520,00	96,88
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)	218.003.800	-	95.000.000	94.059.358	99,01	94.059.358,00	43,15
Kegiatan Admisntrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	912.904.550	891.052.948	393.988.197	391.135.442	99,28	1.282.188.390,00	140,45
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani (bulan)	906.904.550	891.052.948	387.988.197	386.198.782	99,54	1.277.251.730,00	140,84
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)		-		-	-	-	-

Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	3.000.000	-	3.000.000	2.909.160	96,97	2.909.160,00	96,97
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	3.000.000	-	3.000.000	2.027.500	67,58	2.027.500,00	67,58
Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	3.660.841.800	780.735.000	55.890.410	52.700.000	94,29	833.435.000,00	22,77
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	155.000.000	-	31.109.750	27.950.000	89,84	27.950.000,00	18,03
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (paket)	155.000.000	-	24.780.660	24.750.000	99,88	24.750.000,00	15,97
	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (paket)	205.351.800	-		-	-	-	-
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (unit)	300.490.000	780.735.000	-	-	-	780.735.000,00	259,82
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang diadakan (unit)	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (%)	3.733.774.450	3.461.338.560	1.235.051.900	1.227.740.835	99,41	4.689.079.395,00	125,59
	Persentase Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi (%)	368.043.525	362.410.819	123.565.088	106.962.522	86,56	469.373.341,00	127,53

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	3.256.861.150	3.016.127.960	1.044.226.900	1.038.336.903	99,44	4.054.464.863,00	124,49
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Iar dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)	368.043.525	362.410.819	123.565.088	106.962.522	86,56	469.373.341,00	127,53
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (paket)	22.900.000	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan (laporan)	454.013.300	445.210.600	190.825.000	189.403.932	99,26	634.614.532,00	139,78
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	656.526.000	3.528.385.688	191.300.000	190.435.586	99,55	3.718.821.274,00	566,44
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (unit)	355.020.000	426.161.688	143.670.000	143.238.386	99,70	569.400.074,00	160,39
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (paket)	51.316.000	67.874.000	22.630.000	22.589.000	99,82	90.463.000,00	176,29
Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	250.190.000	3.034.350.000	25.000.000	24.608.200	98,43	3.058.958.200,00	1.222,65
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang direhabilitasi (unit)	-	-	-	-	-	-	-

Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	768.744.788	-	117.746.800	112.232.996	95,32	112.232.996,00	14,60
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Rasio Tenaga Kerja yang kompeten Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	768.744.788	0,00	117.746.800	112.232.996	95,32	112.232.996,00	14,60
						-	-	-
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berdasarkan Klaster Kompetensi (orang)	768.744.788	-	117.746.800	112.232.996	95,32	112.232.996,00	14,60
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	286.544.293	249.251.476	125.896.960	106.033.515	84,22	355.284.991,00	123,99
Kegiatan Pengelola Informasi Pasar Kerja	Rasio Informasi Lowongan Pekerjaan yang tersedia	286.544.293	185.096.000			-	185.096.000,00	64,60
	Persentase informasi lowongan kerja yang diakses pencari			101.076.960	90.183.515	89,22	90.183.515,00	-
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir Hub)	143.672.113	185.096.000	0	-	-	185.096.000,00	128,83
	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)		-	101.076.960	90.183.515	89,22	90.183.515,00	-
	Jumlah pencari kerja disabilitas yg mengikuti simposium				-	-	-	-
	Jumlah Dokumen RTKD (Rencana Tenaga Kerja Daerah)		-		-	-	-	-
Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan	142.872.180	-		-	-	-	-

Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja daam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	64.801.938,00	64.155.476,00	-	0	-	64.155.476,00	99,00
	Jumlah Perpanjngn IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (Satu) daerah kabupaten Bangka			24.820.000,00	15.850.000	63,86	15.850.000,00	0,24
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Bangka	64.801.938	64.155.476	24.820.000	15.850.000	63,86	80.005.476,00	123,46
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan (%)	564.887.000	177.267.684	144.831.590	136.421.893	94,19	313.689.577,00	55,53
Kegiatan Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (%)	118.528.000	58.700.000	20.550.000	20.500.000	99,76	79.200.000,00	66,82
Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	38.500.000	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang didaftarkan di Dinakerperindag	-	-	-	-	-	-	-

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi Saran HI (PP, PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	80.028.000	58.700.000	20.550.000	20.500.000	99,76	79.200.000,00	98,97
Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota	Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	446.359.000	118.567.684	124.281.590	115.921.893	93,27	234.489.577,00	52,53
Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Perkara perselisihan yang terselesaikan	149.733.000	118.567.684	45.507.590	44.535.787	97,86	163.103.471,00	108,93
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi (Asosiasi)	97.168.000	-	20.000.000	19.319.657	96,60	19.319.657,00	19,88
Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	199.458.000	-	58.774.000	52.066.449	88,59	52.066.449,00	26,10

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN PERDAGANGAN		1.488.763.825	4.659.797.683	3.052.719.430	2.568.469.324	268	7.228.267.007	485,52
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki izin perdagangan (%)	350.000.000	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan fasilitasi izin Perdagangan (%)	350.000.000	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik	Data Pelaku Usaha Perdagangan yang Mendapatkan Izin	350.000.000	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang Representatif	-	4.478.835.116	2.504.719.430	2.062.091.796	82,33	6.540.926.912,00	-
Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase pencapaian Target penerimaan retribusi sarana distribusi Perdagangan	7.582.546.500	4.478.835.116	2.504.719.430	2.062.091.796	82,33	6.540.926.912,00	86,26
	Persentase Peningkatan Pasar Rakyat yang menggunakan E-Money		0,00	0,00	0,00	-	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar/ruko/kios/los/toko dan gudang yang dibangun	7.000.000.000	0,00	-	-	-	-	-

	Jumlah Pedagang yang menerima bantuan sarana dan prasarana perdagangan	200.000.000	0,00	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pelayanan UPT Pasar	7.382.546.500	4.478.835.116	2.504.719.430	2.062.091.796	82,33	6.540.926.912,00	88,60
	Jumlah Pasar Yang menerapkan Pembayaran Retribusi Berbasis E- Money	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok & Barang penting	659.854.050	66.143.500	407.000.000	374.446.492	92,00	440.589.992,00	-
	Persentase Kecukupan Stok Barang Kebutuhan Pokok & Barang penting		-	-		-	-	-
Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rasio terlaksananya monitoring/pemantauan harga dan stok Bapokting pada Pelaku Usaha perdagangan	659.854.050	66.143.500	407.000.000	374.446.492	92,00	440.589.992,00	-
Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Data Harga Bapokting	342.613.000	46.095.000	84.000.000	81.577.360	97,12	127.672.360,00	37,26
	Data Stok Bapokting		-	-	-	-	-	-

Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Data Harga Bapokting	100.000.000	-	-	-	-	-	-
	Data Stok Bapokting		-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pasar yang Dilakukan	217.241.050	20.048.500	323.000.000	292.869.132	90,67	312.917.632,00	144,04
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat standar tera/tera ulang	478.909.775	114.819.067	141.000.000	131.931.036	93,57	246.750.103,00	51,52
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, tera Ulang dan Pengawasan	Persentase Penurunan Pelanggaran UTTP (%)	478.909.775	114.819.067	141.000.000	131.931.036	93,57	246.750.103,00	51,52
Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	366.081.775	108.634.067,00	119.000.000	110.462.917	92,83	219.096.984,00	59,85
Sub Kegiatan Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pemilik UTTP yang mendapatkan pengawasan dan penyuluhan Metrologi legal	112.828.000	6.185.000,00	22.000.000	21.468.119	97,58	27.653.119,00	24,51

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		4.068.427.450	15.341.839.727	1.489.790.221	1.124.432.051	75,48	16.466.271.778,00	404,73
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perentase Penjaminan Mutu dan Perlindungan Produk					-	-	0
	Persentase Peningkatan Penjaminan Mutu Produk IKM	3.647.703.200	15.310.338.227	1.463.317.721	1.114.914.051	76,19	16.425.252.278,00	450,29
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan industri yang mendapatkan Standarisasi Manajemen Mutu Produk IKM	3.647.703.200	15.310.338.227	1.463.317.721	1.114.914.051	76,19	16.425.252.278,00	450,29
	Persentase Pelaku IKM yang mendapatkan sertifikat kompetensi	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase Pelaku IKM yang mendapatkan sertifikat teknis dan manajerial	-	-	-	-	-	-	-
	Nilai Produksi IKM	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase Pelaku IKM yang mendapat fasilitasi promosi, pemasaran dan hubungan kemitraan	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase Peningkatan industri yang mendapatkan fasilitasi pengembangan produk	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase Peningkatan industri yang mendapatkan Standarisasi Manajemen Mutu Produk IKM	-	-	-	-	-	-	-

	Persentase Pelaku IKM yang mendapatkan sertifikat teknis dan manajerial	-	-	-	-	-	-	-
	Nilai Produksi IKM (juta rupiah)	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase Pelaku IKM yang mendapat fasilitas promosi, pemasaran dan hubungan kemitraan	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase Peningkatan industri yang mendapatkan fasilitas pengembangan produk	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase Peningkatan industri yang mendapatkan Standarisasi Manajemen Mutu Produk IKM	-	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaku IKM yang mengikuti diklat berbasis Kompetensi	300.000.000	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen perencanaan (DED) yang disusun	151.800.000	141.392.209	-	-	-	141.392.209,00	93,14
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah pelaku IKM yang mengikuti diklat berbasis teknis dan manajerial	1.293.691.400	15.109.808.158	-	-	-	15.109.808.158,00	1.167,96
	Jumlah Sarana dan prasarana yang difasilitasi kepada IKM	-	-	-	-	-	-	-

	Jumlah Modal awal yang difasilitasi kepada WUB	400.000.000	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Unit Usaha industri dan jumlah sentra serta IKM yang mengikuti pameran	653.952.000	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti Temu usaha dan kompetisi produk inovatif dan kreatif	200.000.000	-	-	-	-	-	-
	Jumlah IKM yang mendapat bantuan Litbang produk	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah IKM yang mendapat bantuan desain kemasan	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah industri yang mendapatkan fasilitasi bimbingan dan sertifikat merek	86.206.400	-	-	-	-	-	-
	Jumlah IKM yang mendapat Sertifikat GMP	300.000.000	59.137.860	-	-	-	59.137.860,00	19,71
	Jumlah IKM yang mendapat Sertifikat Uji Nutrisi	150.000.000	-	-	-	-	-	-
	Jumlah produk IKM yang diawasi BTPnya	112.053.400	-	-	-	-	-	-
	Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat Halal	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah IKM yang dapatkan OVOP	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan sumberdaya industri dan peran serta masyarakat (dokumen)	1.229.861.365	-	1.463.317.721	1.114.914.051	76,19	1.114.914.051,00	90,65

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan IKM	90.000.000	-	10.472.500	300.000	2,86	300.000,00	0,33
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kabupaten/Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase Pelaku IKM yang mendapat Fasilitas Promosi, Pemasaran dan hubungan kemitraan	90.000.000	-	10.472.500	300.000	2,86	300.000,00	0,33
Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dalam sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusahaan sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan Usaha untuk bidang Usaha dengan resiko Usaha Menengah, Tinggi dan Tinggi, melalui SIINAS yang terintegrasi dengan sistem OSS (dokumen)	90.000.000		10.472.500	300.000	2,86	300.000,00	0,33

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan IKM	330.724.250	31.501.500	16.000.000	9.218.000	57,61	40.719.500,00	12,31
Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan kabupaten/Kota	Persentase Pelaku IKM yang mendapat Fasilitas Promosi, Pemasaran dan hubungan kemitraan	330.724.250	31.501.500	16.000.000	9.218.000	57,61	40.719.500,00	12,31
Sub kegiatan Desiminasi, Publikasi Data informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS	Jumlah dokumen hasil desiminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri kabupaten/kota melalui SIINAS	330.724.250	31.501.500	16.000.000	9.218.000	57,61	40.719.500,00	12,31

Terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinakerperindag Kabupaten Bangka Tahun 2023, sebagaimana tersaji pada table diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan :

Pada Tahun 2023 Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja Hasil/Keluaran sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas;
2. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Infromasi Pasar Kerja Online;
3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Sub Kegiatan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang dampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
6. Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan :

Tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka sebanyak Program 10 (sepuluh), Kegiatan 18 (delapan belas), Sub Kegiatan 40 (empat puluh) dan dapat mencapai 100% dan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan triwulan IV antara lain sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota
terdiri dari :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

3. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD.
 5. Kegiatan Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya.
 6. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
 - Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klasater Kompetensi.

Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar kerja Online.
2. Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota.

Program Hubungan Industrial terdiri dari :

1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana hubungan industrial dan jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja, dan penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Bangka;
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non afiliasi;
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan terdiri dari :

1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting terdiri dari :

1. Kegiatan Pengendalian Harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen terdiri dari :

1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, tera Ulang dan Pengawasan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, Tera Ulang;
 - Sub Kegiatan Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal.

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terdiri dari :

1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten /Kota terdiri dari :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan

Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasikan dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasikan secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional terdiri dari :

1. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Desiminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS.

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja

Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 Tidak ada program/kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tabel Program/Kegiatan Yang Melebihi Target

No.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN
1.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	33 TKA	44 TKA

2.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera Ulang dan Pengawasan		
	Sub Kegiatan Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	100 orang	380 orang
3.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	8 Dokumen	11 Dokumen

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	4.391.616.500,00	4.806.937.300,00	109,46
Hasil Retribusi Daerah	4.391.616.500,00	4.806.937.300,00	109,46
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	120.000.000,00	129.850.000,00	108,21
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.383.766.000,00	1.643.947.500,00	118,80
- Retribusi Penyediaan fasilitas Pasar / Pertokoan yang dikontrakkan	1.150.000.000,00	1.071.902.000,00	93,21
- Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.607.350.500,00	1.792.555.000,00	111,52
- Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	130.500.000,00	168.682.800,00	129,26

2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya/~~Melebihi~~ Target Kinerja

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya/~~melebihi~~ target kinerja realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

Terdapat beberapa program yang ditunda pelaksanaannya dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2023. Selanjutnya capaian atas kinerja tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinakerperindag tahun 2025 dan melakukan upaya-upaya seperti anggaran kedepan perlu dipacu target yang tidak tercapai sehingga diakhir renstra target bisa tercapai dengan mengupayakan jempot bola penggunaan pendanaan dari APBN, DAK, Dana Insentif Fiskal sehingga tidak membebani APBD Kabupaten Bangka.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab ~~tidak tercapainya~~/~~melebihi~~ target kinerja realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan Aparatur Dinakerperindag yang mampu menyelesaikan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. Terlaksananya koordinasi antar sektor terkait;
3. Adanya anggaran yang tersedia sehingga bisa mencukupi untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah disepakati didalam dokumen perencanaan.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap Capaian Program Renstra

Berdasarkan target capaian program sesuai dengan Renstra 2019-2023 secara keseluruhan program dan Kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4

Tabel Target dan Capaian sampai Tahun 2020

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2019		Target 2020		Realisasi 2019		Realisasi 2020		Capaian sampai 2020
		Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	
Meningkatnya akuntabilitas Dinakerperindag	Nilai Evaluasi AKIP						73,98			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Layanan Adminstrasi Kantor Yang tertangani (%)	4.230.128.850	80	3.319.780.600	80	4.004.378.320	80	3.186.941.616	80	100
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan Tertib Penatausahaan persuratan yang tertangani Surat Menyurat (Bulan)	880.975.500	12	953.931.000	12	864.260.318	12	948.052.313	12	100
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlaj Layanan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Kantor (Bulan)	96.597.500	12	139.765.500	12	68.268.567	12	89.746.167	12	100
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Layanan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara (Bulan)	21.300.000	12	18.950.000	12	21.300.000	12	18.450.000	12	100
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (Bulan)	115.420.000	12	103.980.000	12	90.584.488	12	92.730.712	12	100
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Layanan Jasa Kebersihan Kantor Yang tertangani (Bulan)	140.055.500	12	153.007.000	12	140.028.000	12	152.953.360	12	100

Kegiatan Monev Program, Kegiatan dan Aset Dinakerperindag	Jumlah Monev program, kegiatan adan aset yang ditangani (Bulan)	-	0	-	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Layanan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultaasi Keluar Daerah	268.955.350	12	98.259.600	12	268.955.350	12	98.089.929	12	100
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Pembinaan Dalam Daerah	Jumlah Layanan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Dalam Daerah yang tertangani(Bulan)	86.800.000	12	67.625.000	12	84.930.000	12	67.502.000	12	100
Kegiatan Biaya Penyelenggaraan UPT Pasar Sungailiat	Jumlah Biaya Penyelenggaraan UPT Pasar Sungailiat yang tertangani (Bulan)	2.030.833.500	12	0	0	2.002.545.183	12	0	0	50
	Jumlah Pelayanan UPT Pasar Sungailiat yang tertangani	0	0	1.784.262.500	12	0	0	1.719.417.135	12	50
Kegiatan Biaya Penyelenggaraan UPT Pasar Belinyu	Jumlah Biaya Penyelenggaraan UPT Pasar Belinyu yang tertangani (Bulan)	589.191.500	12	0	0	463.506.414	12	0		50
	Jumlah Pelayanan UPT pasar Belinyu yang tertangani	-	0	595.711.500	12	0	0	455.444.839	12	50
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (%)	505.475.000	80	0	80	494.365.818	80	0	0	50

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang tersedia (paket)	149.240.000	1	0	0	148.633.000	1	0	0	50
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (paket)	252.335.000	1	0	0	247.730.743	1	0	0	50
Kegiatan Pengadaan Meubelair	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia (paket)	58.600.000	1	0	0	52.912.000	1	0	0	50
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang tersedia (unit)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Rehab Sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab (unit)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jmlah Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin/berkal (unit)	45.300.000	1	0	0	45.090.075	1	0	0	50
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% Peningkatan Disiplin Aparatur	46.300.000	80	0	80	42.300.000	80	0	0	50
Kegiatan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) yang tersedia (stel)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Olahraga yang tersedia (stel)	9.800.000	16	0	0	9.800.000	16	0	0	50
	Jumlah Pakaian adat (stel)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah pakaian Tradisonal (Batik Cual) yang tersedia (stel)	36.500.000	73	0	0	32.500.000	65	0	0	45

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	60.000.000	80	20.145.700	80	41.108.980	80	20.145.679	80	100
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek (orang)	60.000.000	6	20.145.700	4	41.108.980	6	20.145.679	5	113
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaporan Keuangan dan Kinerja tepat waktu (%)	15.000.000	80	15.000.000	80	15.000.000	80	15.000.000	80	100
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun	15.000.000	13	15.000.000	10	15.000.000	14	15.000.000	8	94
	Jumlah Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan				2				24	
Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah	Informasi Hasil Pembangunan Daerah Tepat Waktu (%)	10.000.000	80	0	-	9.955.000	80	0	0	50
Kegiatan Pameran Pembangunan Daerah	Pawai Budaya dan Kendaraan Hias (kali)	10.000.000	2	0	2	9.955.000	2	0	0	50
Meningkatnya Kesempatan kerja	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja		68,16		68,16		96,20		94,58	140
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Meningkatnya Tenaga Kerja yang Kompeten	0	24,95	32.915.200	26,17	0	0	32.268.200	0	0
	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	0	23,81	18.150.000	26,15	0	0	15.490.000	50,00	96
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Data Jumlah LPKS	0	0	18.150.000	25	0	0	15.490.000	10	20

Kegiatan Pelatihan Elektronik (Refrigerasi Dasar)	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan	0	0	32.915.200	20	0	0	32.268.200	0	0
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	68.625.200	33,33	41.590.000	34,91	68.429.230	19	40.820.000	106,60	181
Kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Data Informasi Bursa Tenaga Kerja (Buku)	48.275.200	12	27.345.000	10	48.184.230	10	27.325.000	10	92
Kegiatan Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah	Laporan Monitoring Pencari Kerja yang ditempatkan (Buku)	-	0	-		0	0	0		0
Kegiatan Penyusunan Database Pencari Kerja	Jumlah Kartu Pencari kerja yang diterbitkan (Kartu pencari Kerja)	-	0	0		0	0	0		0
	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan		54,17	14.245.000	56	0	35,29	13.495.000	106,60	128
Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pendataan IMTA-TKA/Pelaporan	Data jumlah TKA dalam satu wilayah (TKA)	20.350.000	30	14.245.000	30	20.245.000	17	13.495.000	32	82
Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	Persentase Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan syarat-syarat kerja	-	47,89		49,30	0	47,89		49,30	100
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Perusahaan yang membuat & mengesahkan peraturan perusahaan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan	93.047.000	28,38	46.480.000	31,94	91.975.150	28,38	46.265.000	31,94	100

Kegiatan Forum Komunikasi Ketenagakerjaan LKS (Lembaga Kerjasama Tripartit)	Pelaksanaan Sidang LKS Tripartit di Kabupaten Bangka (Dokumen)	41.100.000	4,00	-	4,00	40.185.000	4	0	0	50
Kegiatan Pembinaan Sarana HI	Laporan pembinaan Sarana HI (1 Laporan 15 perusahaan)	17.796.500	1,00	12.820.000	1,00	17.706.500	1	12.655.000	1,00	100
Kegiatan Pemetaan Tingkat kerawanan HI	Laporan Pemetaan Tingkat Kerawanan HI (15 Perusahaan)	-	0	12.535.000	1,00	0	0	12.530.000	1,00	50
Kegiatan Pendataan dan verifikasi Keanggotaan Serikat Kerja/Serikat Buruh	Jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terverifikasi keanggotaannya	-	0	-	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Monitoring Penerapan Upah Minimum di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan upah minimum	-	0	-	0	0	0	0	0	0
	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	34.150.500	53,33	21.125.000	60,00	34.083.650	70,83	21.080.000	73,07	127
Kegiatan Penyelesaian Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Kasus yang diselesaikan melalui PB dan Anjuran	34.150.500	8,00	21.125.000	10,00	34.083.650	17	21.080.000	24	226
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	-	22,56	-	22,58	0	21,23	0	21,57	95
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase Peningkatan Penjaminan Mutu Produk IKM	23.843.500	23,40	2.964.235.000	24,96	22.000.500	25	2.862.674.506	24,96	103

Kegiatan Pendampingan Peningkatan Daya Saing Produk Industri melalui Fasilitasi Pengujian Kadaluarsa Produk Pangan	Jumlah IKM yang mendapat Sertifikasi, SNI, GMP, HACCP, Halal, Desain Kemasan dan Merek,Uji Nutrisi serta Kadaluarsa Pangan	-	0	0		0	0	0		0
Kegiatan Pendampingan Peningkatan Daya Saing Produk Industri melalui Fasilitasi Uji Nutrisi Produk Pangan	Jumlah IKM yang mendapat Sertifikasi, SNI, GMP, HACCP, Halal, Desain Kemasan dan Merek,Uji Nutrisi serta Kadaluarsa Pangan	-	0	0		0	0	0		0
Pendampingan Peningkatan Daya Saing Produk Industri melalui Fasilitasi HKI	Jumlah IKM yang mendapat sertifikat merek dan desain industri	-	0	0		0	0	0		0
Pendampingan Peningkatan Daya Saing Produk Industri melalui Fasilitasi Kemasan Produk	Jumlah IKM yang mendapat Sertifikasi, SNI, GMP, HACCP, Halal, Desain Kemasan dan Merek,Uji Nutrisi serta Kadaluarsa Pangan	-	0	0		0	0			0
Kegiatan Pedampingan IKM Pangan melalui penyediaan bahan tambahan pangan	Jumlah produk industri yang diawasi penggunaan Bahan Tambahan Pangannya	-	0	0		0	0	0		0
Kegiatan Pengawasan Bahan Tambahan Pangan pada Kualitas Produk IKM Pangan	Jumlah produk industri yang diawasi penggunaan Bahan Tambahan Pangannya (sampel IKM Pangan)	23.843.500	1	450.000	1	22.000.500	1	450.000	0	50

Kegiatan Pembangunan Pusat Industri Kerajinan				903.430.000	1	0	0	896.421.566	1	50
Kegiatan Rehabilitasi Galeri				202.485.000	1	0	0	201.477.000	1	50
Kegiatan Penataan Halaman Galeri				202.485.000	1	0	0	200.358.000	1	50
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Galeri				451.735.000	1	0	0	428.467.000	1	50
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan untuk pusat dan Perlengkapan Pusat Industri Kerajinan				1.001.960.000	1	0	0	944.904.640	1	50
Kegiatan Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan Produksi				201.690.000	1	0	0	190.596.300	1	50
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase IKM Terlatih terhadap Jumlah IKM	803.871.000	2,58	-	15,46	1.034.420.405	3,74	0	6,97	95
Kegiatan Pelatihan Pengolahan Diversifikasi Produk Kerajinan Anyaman dari Lidi Kelapa	Jumlah IKM yang dilatih	66.731.000	20	0	0	63.060.655	20	0		50
Kegiatan Pelatihan Good Manufacturing Practices (GMP) pada IKM Pangan	Jumlah IKM yang mendapat sertifikat GMP	737.140.000	115	0	25	617.448.602	147	0	0	64
Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan IKM melalui Magang SDM Pelaku industri	Jumlah IKM yang mengikuti magang dan studi banding	-	0	0	0	0	0	0		0
Kegiatan Pendampingan Diversifikasi Produk Kerajinan Anyaman dari Daun Pandan	Jumlah IKM yang mengikuti magang dan studi banding	-	0	0	0	0	0	0		0

Kegiatan Pendampingan IKM melalui fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Jumlah IKM yang mendapat pemberian informasi pasar	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pedampingan IKM melalui bimtek diversifikasi produk olahan hasil perkebunan	Jumlah IKM yang dilatih	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pedampingan IKM melalui bimtek diversifikasi produk olahan hasil pertanian	Jumlah IKM yang dilatih	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pendampingan IKM kerumah produksi olahan jamur dan olahan buah segar	Jumlah IKM yang mengikuti magang dan studi banding	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Bimtek diversifikasi produk olahan berbahan baku nanas	Jumlah IKM yang dilatih	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Bimtek diversifikasi produk olahan berbahan baku buah-buahan	Jumlah IKM yang dilatih	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Bimtek diversifikasi produk olahan berbahan baku sayuran	Jumlah IKM yang dilatih	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Bimtek diversifikasi produk olahan berbahan baku jamur	Jumlah IKM yang dilatih	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Bimtek diversifikasi produk kerajinan berbahan baku potensi SDA	Jumlah IKM yang dilatih	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Bimtek Diversifikasi produk kerajinan anyaman dari daun pandan	Jumlah IKM yang dilatih	-	0	0	0	0	0	0	0	0

Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita / Perempuan Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah Wanita/Perempuan di Perdesaan yang dilatih (IKM Perempuan Perdesaan)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	Persentase Peningkatan Pertumbuhan dan Pembinaan Sektor Industri Pengolahan IKM	363.100.000	14,12	371.215.000	15,46	0	13,18	354.858.700	15,71	97
Kegiatan Partisipasi Pameran keluar Daerah		363.100.000	5	8.900.000	5	353.911.148	7	890.000	0	70
Kegiatan Pelatihan Good Manufacturing Practise (GMP) pada IKM Pangan		-	0	0	25		0	0	0	0
Kegiatan Sertifikat Halal Produk IKM		-	0	362.315.000	80		0	353.968.700	80	50
Program Pengembangan Sentra-sentra industri Potensial	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan sentra industri potensial	22.645.000	33,33	35.000.000	15,46	20.925.000	33	34.865.000	15,71	51
Kegiatan Pendataan Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan data Industri	Buku Data Industri dan Laporan Informasi Industri (Buku)	22.645.000	10	35.000.000	25	20.925.000	10	34.865.000	25	100
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	-	13,78	0	14,19	0	14,17	0	13,08	98
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Penurunan pelanggaran Alat UTTP (%)	1.445.255.000	33,39	177.460.000	26,50	1.219.798.122	5,05	174.495.200	25,76	56
Kegiatan Pelayanan dan Kepengembangan	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera	147.764.000	2000	8.950.000	700	143.468.122	1.889	8.280.000	738	100

Kemetrologian	ulang									
Kegiatan Kajian naskah akademis dan penyusunan raperda Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang	Jumlah Naskah dan Raperda retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang	-	2	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pengadaan Peralatan Standar Kemetrologian (DAK)	Jumlah Peralatan Metrologi Legal yang sesuai standar (Paket)	1.271.691.000	1	0	0	1.050.550.000	1	0	0	50
Kegiatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian	Jumlah Peralatan dan Sarana Penunjang Tera/Tera Ulang	-	0	167.560.000	1	0	0	165.265.200	1	50
Kegiatan Pembelian Kendaraan Operasional kemetrologian (DAK)	Jumlah Kendaraan operasional Metrologi Legal yang sesuai standar(Paket)	-	1	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pembangunan Gedung Kemetrologian (DAK)	Jumlah Gedung Metrologi yang dibangun/Rehab (Unit)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penurunan Peredaran Barang dan jasa yang tidak sesuai standar (%)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah Barang yang diawasi di Kabupaten Bangka (jenis)	25.800.000	37	950.000	37	25.780.000	37	950.000	0	50
	Peningkatan Promosi Produk Perdagangan (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Peningkatan Promosi Produk Perdagangan	Jumlah IKM yang berpartisipasi dalam Pameran (kali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Ketersediaan Kebutuhan pokok sampai di tingkat pasar kecamatan (%)	61.075.000	87,50	1.246.825.000	87,50	58.885.000	87,50	1.226.002.000	91,60	102
	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif	61.075.000	83,33	1.246.825.000	83,33	0	83,33	0	36,88	72
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Informasi Ketersediaan dan Distribusi barang kebutuhan pokok	Laporan stok barang dan laporan informasi harga kebutuhan pokok dan barang penting (dok)	44.050.000	20	42.555.000	23	41.860.000	20	40.935.000	23	100
Kegiatan Pelaksanaan Pasar murah	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah (kali)	17.025.000	5	0	0	17.025.000	5	0	0	50
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Usaha Kuliner	Jumlah Pasar/Ruko/Los /Tempat /Kuliner/Galeri yang representatif	0	0	1.003.580.000	1	0	0	989.977.000	1	50
Kegiatan Pengadaan Prasarana Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Bantuan Prasaran Perdagangan	0	0	200.690.000	1	0	0	195.090.000	1	50

Tabel 2.5
Tabel Target dan Capaian sampai Tahun 2023

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021		Target 2022		Target 2023		Realisasi 2021		Realisasi 2022		Realisasi 2023		Capaian sampai 2023
		Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah		74		74,25		74,5		74,62		73,86		76,23	102,32
	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	15.000.000	28	30.000.000	28,3	49.995.000	28,5	14.997.500	25,07	29.935.206	24,23	49.300.800	25,35	88,95
	Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	15.000.000	11	10.000.000	11,2	13.665.000	11,45	15.000.000	11,05	10.000.000	11,25	13.665.000	11,50	100,44
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	15.000.000	100	30.000.000	100	49.995.000	100	14.997.500	100	29.935.206	100	49.300.800	100	100
	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	15.000.000	100	10.000.000	100	13.665.000	100	15.000.000	100	10.000.000	100	13.665.000	100	100
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	15.000.000	8	30.000.000	6	37.355.000	6	14.997.500	10	29.935.206	6	36.660.800	6	108,33
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0	0	3.160.000	5	0	0	0	0	3.160.000	5	33,33
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0	0	3.160.000	2	0	0	0	0	3.160.000	2	33,33

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	0	0	3.160.000	2	0	0	0	0	3.160.000	2	33,33
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	0	0	3.160.000	2	0	0	0	0	3.160.000	2	33,33
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	24	10.000.000	12	8.545.000	4	15.000.000	32	10.000.000	24	8.545.000	4	144,44
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	5.120.000	8	0	0	0	24	5.120.000	8	33,33
	Persentase temuan pengelolaan keuangan OPD dalam LHP BPK RI	5.707.590.785	0	6.098.773.425	0	6.250.222.063	0	4.728.369.611,60	0	4.745.101.645	0	4.707.541.101	0	0
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Kinerja yang disusun Sesuai standar	5.707.590.785	100	6.098.773.425	100	6.250.222.063	100	4.728.369.611,60	100	4.745.101.645	100	4.707.541.101	100	100
	Persentase penatausahaan keuangan yang sesuai standar		100		100		100		100		66,67			
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN					6.213.622.063	48	0,00	0	0	0	4.673.782.891	48	33,33
	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani	5.707.590.785	12	6.098.773.425	12		48	4.728.369.611,60	12	4.745.101.645	12		48	66,67
	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun		2		38		0		2		0			33,33

Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0	0	24.840.000	12	0	0	0	0	24.237.760	12	33,33
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0	0	5.880.000	2	0	0	0	0	5.720.000	2	33,33
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	0	0	5.880.000	40	0	0	0	0	3.800.450	40	33,33
	Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	0	63,49	9.800.000	63,7	107.750.000	64,05	0	0	9.740.000	0	106.635.878	64,16	33,39
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	0	100	9.800.000	100	12.750.000	100	0	0	9.740.000	100	12.576.520	100	66,67
	Persentase Aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	0	7,55	0	0	95.000.000	100	0	0	0	0	94.059.358	100	33,33
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0	0	9.800.000	16	9.750.000	1	0	0	9.740.000	16	9.670.000	1	66,67
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	0	0	3.000.000	11	0	0	0	0	2.906.520	11	33,33

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0	95.000.000	10	0	0	0	0	94.059.358	10	33,33
	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	389.470.000	0,9	1.767.106.140	95	641.178.607	100	386.616.408	0	1.759.033.748	0	634.271.028	100	33,33
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	212.450.000	90	325.624.000	90	393.988.197	70	211.658.771	90	325.214.474	95	391.135.442	100	116,14
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	387.988.197	12	-	-	-	-	386.198.782	12	33,33
	Jumlah layanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani													66,67
	Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani	212.450.000	12	325.624.000	12	-	12	211.658.771	12	325.214.474	12	-	-	100
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	0	3.000.000	12	0	0	0	0	2.909.160	12	33,33
Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	0	0	3.000.000	12	0	0	0	0	2.027.500	12	33,33
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	0	90	260.245.000	90	55.890.410	100	0	90	260.245.000	90	52.700.000	100	100
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0	0	260.245.000	1	0	0	0	0	260.245.000	1	0	0	33,33
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	0	0	0	31.109.750	1	0	0	0	0	27.950.000	1	33,33

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0	0	0	0	24.780.660	30	0	0	0	0	24.750.000	30	33,33
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	177.020.000	90	1.181.237.140	90	191.300.000	100	174.957.637	90	1.173.574.274	90	190.435.586	100	100
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	0	0	22.630.000	1	22.630.000	30	0	0	22.622.000	1	22.589.000	30	66,67
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	107.920.000	4,14	143.557.140	4&14	143.670.000	4&14	106.350.637	2 & 1	141.302.274	2 & 5	143.238.386	4 & 1	27,78
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantordan Bangunan yang dipelihara/Direhabilitasi	69.100.000	1	1.015.050.000	1	25.000.000	1	68.607.000	1	1.009.650.000	1	24.608.200	1	100
	Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	1.264.813.961	0,6	1.292.860.597	60	1.358.616.988	2	1.237.877.991	0	1.265.444.391	0	1.334.703.357	2	33,33
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	1.105.070.480	100	1.161.370.920	100	1.235.051.900	100	1.102.155.010	100	1.149.983.820	100	1.227.740.835	100	100
	Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	159.743.481	100	131.489.677	3	123.565.088	100	135.722.981	100	115.460.571	3	106.962.522	3	67,67
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	936.903.180	12	1.012.272.520	12	1.044.226.900	12	934.078.090	12	1.001.927.720	12	1.038.336.903	12	100
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	159.743.481	12	131.489.677	12	123.565.088	12	135.722.981	12	115.460.571	12	106.962.522	12	100

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	16.880.000	1	0	12	0	0	16.871.500	1	0	0	0	0	33,33
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Kebersihan kantor yang tertangani	151.287.300	12	149.098.400	12	190.825.000	12	151.205.420	12	148.056.100	12	189.403.932	12	100
Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	0	23,84		31,77		32,15		31,57		30,11		41,38	128,71
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase Tingkat produktivitas Tenaga Kerja	0	8,6	0	0	117.746.800	8,8		0		0	112.232.996	8,8	33,33
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang kompeten	0		0	0	117.746.800	5,3	0		0	0	112.232.996	5,3	33,33
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan dan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	0	0	0	0	117.746.800	30	0	0	0	0	112.232.996	30	33,33
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	% Pencari Kerja yang ditempatkan	33.730.600	32,65	123.323.000	32,9	125.896.960	32,95	25.649.000	70,59	82.127.738	15,96	106.033.515	5,69	93,50
Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rasio Informasi Lowongan pekerjaan yang diakses pencari kerja	21.180.600	0,33	-	-	-	-	15.959.000	1,43	-	-	-	-	144,44
	Persentase Informasi Lowongan kerja yang diakses Pencaker	0	0	63.323.000	45	101.076.960	52		-	60.886.500	45	90.183.515	74,46	81,06
Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Pasar kerja Online	Jumlah informasi lowongan pekerjaan yang diakses pencari kerja	21.180.600	7	63.323.000	9	-	-	-	10	60.886.500	9	-	-	80,95
	Jumlah Dokumen RTKD		1		1	-	-	-	0		1	33,33		

	Jumlah Pencari dan Pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui Sistem Online (karir Hub)	-	-	-	-	101.076.960	10	-	-	-	-	90.183.515	6	20
							265						404	50,82
							100						35	11,67
	% TKA yang terdata	12.550.000	21,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab. Bangka	Rasio Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	12.550.000	0,18	-	-	-	-	-	0,44	-	-	-	-	81,48
	Jumlah Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	60.000.000	11	24.820.000	13	0	0	21.241.238	6	15.850.000	11	46,39
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Jumlah TKA yang terdata	12.550.000	33	21.673.000	33	24.820.000	35	9.690.000	47	21.241.238	53	15.850.000	44	142,91
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	% Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	64.565.300	50,7	60.000.000	52,11	144.831.590	53,52	62.490.300	51,4	58.633.842	52,11	136.421.893	53,53	100,47
Kegiatan Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten Kota	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	0	0	60.000.000	39,71	20.550.000	43,94	0	0	19.350.000	39,71	20.500.000	43,94	66,67

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	0	0	20.000.000	6	20.550.000	40	0	0	19.350.000	17	20.500.000	40	127,78
Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota	Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	0	62,5	40.000.000	62,5	124.281.590	62,5		58,3	39.283.842	62,5	115.921.893	62,5	97,76
Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah perkara yang terselesaikan	16.685.300	16	40.000.000	16	45.507.590	16	16.440.500	12	39.283.842	16	44.535.787	16	91,67
Sub Kegiatan Penyelenggaraan dan Verifikasi dan Reakipitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi pengushan dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	12.300.000	14	0	0	20.000.000	2 10	11.025.400	14	0	0	19.319.657	2 10	66,67
Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lks Tripartit yang dibina	35.580.000	4	0	0	58.774.000	1	35.024.400	5	0	0	52.066.449	1	75

Meningkatnya Kontribusi Sektor industri Pengolahan terhadap PDRB	% Kontribusi Sektor industri Pengolahan terhadap PDRB		22,58		22,62		22,64		24,22		26,01		25,26	111,57
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	% Penjaminan Mutu dan Perlindungan Produk IKM	212.950.650	0	16.408.674.508	15,83	1.463.317.721	16	200.530.069	0	15.109.808.158	15,83	1.114.914.051	16,81	68,35
	% Peningkatan Penjaminan Mutu Produk IKM		25,33		25,33		28,99		18,38		18,38		29,03	81,75
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	% Peningkatan industri yang mendapatkan Standarisasi Manajemen Mutu Produk IKM	0	1,7	16.408.674.508	2,77	1.463.317.721	3,65		0,77	15.109.808.158	0,83	1.114.914.051	1,84	41,89
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Pelaku IKM yang mengikuti diklat berbasis teknis manajerial	61.150.650	25	0	0	0	0	59.137.860	25	0	0	0	0	33,33
	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	0	0	16.408.674.508	13	1.463.317.721	8	-	-	15.109.808.158	12	1.114.914.051	10	72,44
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah dokumen DED perencanaan kontruksi	151.800.000	1	0	0	0	0	141.392.209	1	0	0	0	0	33,33
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	% Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan IKM	0	0	0	0	10.472.500	16	0	0	0	0	300.000	16,14	33,63
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri 9IPUj), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan izin Perluasan Kawasan Industri 9IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	% Perusahaan yang menyampaikan Laporan melalui SIINAS	0	0	0	0	10.472.500	15,6	0	0	0	0	300.000	39,42	84,23

Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan resiko Usaha Menengah -Tinggi melalui SIINAS yang terintegrasi dengan sistem OSS	0	0	0	0	10.472.500	30	0	0	0	0	300.000	26	28,89
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	% Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan IKM	23.002.500	15,63	29.740.000	15,83	16.000.000	16	22.817.500	12,16	8.684.000	15,83	9.218.000	16,14	92,89
Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan kabupaten/Kota`	% pelaku IKM yang mendapat fasilitas promosi, pemasaran dan hubungan kemitraan	0	15,37	29.740.000	36,84	0	0	0	40,74	8.684.000	70,97	-	-	152,57
	% Perusahaan yang menyampaikan Laporan melalui SIINAS	0	0	0	0	16.000.000	15,6	0	0	0	0	9.218.000	39,47	84,34
Sub kegiatan Desiminasi, Publikasi Data informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Desiminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS	23.002.500	15	29.740.000	10	16.000.000	3	22.817.500	20	8.684.000	22	9.218.000	3	151,11
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	% Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		14,32		14,51		14,68		12,29		13,13		13,13	89,44
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		1.998.262.900	95	0	0			1.956.825.214	95	0	0	0		33,33
	% Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang Representatif	0	0	3.232.947.000	80	2.504.719.430	100	0	0	2.522.009.902	80	2.062.091.796	100	66,67

Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	% pencapaian Target penerimaan retribusi sarana distribusi Perdagangan	0	100	3.232.947.000	100	2.504.719.430	100	0	104,00	2.522.009.902	101,83	0	109,46	1105,1
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pelayanan UPT Pasar	1.998.262.900	12	3.232.947.000	12	-	-	1.956.825.214	12	2.522.009.902	12	-	-	66,67
	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	-	2.504.719.430	1	-	-	-	-	2.062.091.796	1	33,33
PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok & Barang penting	49.094.050	95	67.000.000	95	407.000.000	100	43.720.500	95	52.833.000	95	374.446.492	100	100
	Persentase Kecukupan Stok Kebutuhan Pokok & Barang penting		95		95		100		95		95		100	100
Kegiatan Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Rasio terlaksananya monitoring/pemantauan harga dan stok Bapakting pada Pelaku Usaha perdagangan	49.094.050	0,95	67.000.000	0,95	407.000.000	100	-	0,95	52.833.000	0,95	374.446.492	100	100
Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	37.613.000	1	42.000.000	1	84.000.000	28	35.865.000	1	40.340.000	1	81.577.360	28	100
Sub Kegiatan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	11.481.050	2	25.000.000	2	323.000.000	8	7.855.500	2	12.493.000	2	292.869.132	7	95,83

PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase standar ulang	Alat tera/tera ulang	53.759.775	65	76.000.000	75	141.000.000	100	47.784.224	53,13	67.034.843	81,75	131.931.036	30,77	73,84
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	% Penurunan Pelanggaran UTPP		53.759.775	65	76.000.000	75	141.000.000	100	47.784.224	14,48	67.034.843	81,75	131.931.036	64,3	65,19
Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Timbang dan alat pelengkapan ditera ulang		47.774.775	1.500	66.000.000	1.650	119.000.000	1.800	46.154.224	863	62.479.843	1.351	110.462.917	1.084	66,54
Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina		5.985.000	20	10.000.000	50	22.000.000	100	1.630.000	363	4.555.000	35	21.468.119	380	755

2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Berdasarkan uraian pada sub 2.1.3 Kinerja Dinakerperindag sampai dengan Akhir Tahun 2023 dapat mencapai target dan ada juga yang melebihi target dan untuk kedepannya agar Dinakerperindag dapat :

1. Mempertahankan program, kegiatan dan sub kegiatan yang melebihi target kinerja;
2. Tetap Melaksanakan koordinasi antar sektor terkait;
3. Dengan anggaran yang tersedia bisa mencukupi untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah disepakati didalam dokumen perencanaan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dalam penyelenggara pemerintahan daerah telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai fungsi dan kewenangannya.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja/target kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan startegis organisasi.

Pengukuran persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{c} \% \\ \text{Pencapaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{c} \% \\ \text{Pencapaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa mendatang, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melihat derajat kinerja Sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.6
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja	Realisasi	Singkatan
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST	ST
76 % ≤ 90% ²	Tinggi	T	T
66% ≤ 75%	Sedang	S	S
51% ≤ 65%	Rendah	R	R
≤ 50%	Sangat Rendah	SR	SR

Tabel 2.7
Realisasi Kinerja Perangkat dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program Tahun 2023

No	Program	Realisasi (%)			
		Kinerja	Kategori *)	Persentase Capaian Keuangan	Kategori *)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	ST	81,29%	T
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	100%	ST	95,32%	ST
3.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	15,78%	SR	84,22%	T
4.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	100%	ST	94,19%	ST
5.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	105,06%	ST	76,19%	T
6.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	100,88%	ST	2,86%	SR
7.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100,88%	ST	57,61%	R
8.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	100%	ST	84.14%	T
9.	PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100%	ST	92,00%	ST
10.	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	30,77%	SR	93,57%	ST

Dari tabel diatas menunjukkan skala derajat kinerja yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk skala kinerjanya 100% dengan kategori Sangat Tinggi dengan Realisasi Keuangan 81,29% dengan Kategori Tinggi, ini di dukung oleh kegiatan : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja untuk skala kinerjanya 100% dengan kategori Sangat Tinggi dengan Realisasi Keuangan 95,32% dengan Kategori Sangat Tinggi, dengan kegiatan : Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.
3. Program Penempatan Tenaga Kerja untuk skala kinerjanya 15,78% dengan kategori Sangat Rendah dengan Realisasi Keuangan 84,22% dengan Kategori Tinggi, dengan kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Bangka.
4. Program Hubungan Industrial untuk skala kinerjanya 100% dengan kategori Sangat Tinggi dengan Realisasi Keuangan 94,19% dengan Kategori Sangat Tinggi, ini di dukung oleh kegiatan : Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Pengesahan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten /Kota, Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri untuk skala kinerjanya 105,06% dengan kategori Sangat Tinggi dengan Realisasi Keuangan 76,19% dengan Kategori Tinggi, ini di dukung oleh kegiatan : Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
6. Program Pengendalian Izin Usaha Industri untuk skala kinerjanya 100,88% dengan kategori Sangat Tinggi dengan Realisasi Keuangan 2,86% dengan Kategori Sangat Rendah, ini di dukung oleh kegiatan : Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota.
7. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional untuk skala kinerjanya 100,88% dengan kategori Sangat Tinggi dengan Realisasi Keuangan 57,61% dengan Kategori Rendah, dengan kegiatan : Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.
8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan untuk skala kinerjanya 100% dengan kategori Sangat Tinggi dengan Realisasi Keuangan 84,14% dengan Kategori Tinggi, dengan kegiatan : Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
9. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting untuk skala kinerjanya 100% dengan kategori Sangat Tinggi dengan Realisasi Keuangan 92,00% dengan Kategori Sangat Tinggi, dengan kegiatan : Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
10. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen untuk skala kinerjanya 30,77% dengan kategori Sangat Rendah dengan Realisasi Keuangan 93,57% dengan Kategori Sangat Tinggi, dengan kegiatan :

Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan,

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka yang secara organisasional melaksanakan Tugas dan Fungsinya pada bulan Januari tahun 2021 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka NOMOR : 188.46/050/DINAKERPERINDAG/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.

Perubahan Indikator kinerja utama di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka disebabkan terjadinya penyesuaian berdasarkan hasil asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan realisasi masing-masing indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 dan diperjanjikan secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Adapun capaian IKU Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinakerperindag Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target akhir Renstra Kriteria	Capaian s/d 2023 terhadap target Renstra (%)
1.	Persentase Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan syarat-syarat kerja	47,89	49,30	-	-	-	-	-
2.	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	96,20	94,58	-	-	-	-	-
3.	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah			31,57	30,11	41,38	32,15	128,71
4.	Persentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	21,23	21,57	24,22	26,01	25,26	22,64	111,57
5.	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,17	13,08	12,29	13,13	13,13	14,68	89,44

Secara umum capaian kinerja Dinakerperindag Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2023 1 (satu) indikator yang melebihi target dan 2 (dua) indikator yang mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinakerperindag 2019-2023.

Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan Dinakerperindag sampai tahun 2022 dapat diukur secara keseluruhan, lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023(Thn n-1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN KETENAGAKERJAAN											
1.	IKK OUTCOME											
	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja		Jumlah Kegiatan Keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dibagi Jumlah Kegiatan Keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten /Kota	100	2,97	1,66	1,68	100	2,97	1,66	2,26	
	IKK OUTPUT											
1.1	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja kabupaten/kota		Mengidentifikasi /Membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
1.2	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja		Menghitung Selisih 6 (enam) Indikator Ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100%	75	66,67	-150	-140	75	66,67	-150	-80	
1.3	Jumlah Perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja di kabupaten/Kota		Jumlah Seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n-1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Jumlah Tenaga kerja Keseluruhan dikali 100%	5,362	4,31	4,35	4,42	5,362	4,31	4,35	4,22	
2.1	Persentase Penerapan Program PBK dengan Kualifikasi Klaster		Jumlah Penerapan Program PBK kualifikasi KKNI atau akupasi pada tahun n dibagi Keseluruhan Program Pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Persentase Instruktur Bersertifikasi Kompetensi		Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n dibagi Jumlah Instruktur seluruhnya pada tahun n dikali 100%	10,34	10,345	10,35	10,35	10,34	10,345	10,35	10,34	
2.3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan		Jumlah instruktur pada tahun n dibagi Jumlah instruktur pada tahun n dikali 100%	0	0	0	96,60	0	0	0	96,67	
2.4	Persentase LPK yang terakreditasi		Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n dibagi Jumlah seluruh LPK pada tahun n dikali 100%	10	10	10	10	10	10	10	10	
2.5	Persentase LPK yang memiliki Perizinan		Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n dibagi Jumlah seluruh LPK yang terdata pada tahun n dikali 100%	0	60	60	60	0	60	60	60	
2.6	Jumlah Pengangguran yang dilatih		Sudah Cukup jelas	0	0	0	30	0	0	0	0	
2.7	Persentase Lulusan bersertifikat pelatihan		Jumlah Lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n dibagi Jumlah orang yang dilatih pada tahun n dikali 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.8	Persentase Penyerapan Lulusan		Jumlah Lulusan yang bekerja pada tahun n dibagi Jumlah lulusan pada tahun n dikali 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.9	Persentase Lulusan Bersertifikasi Kompetensi		Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n dibagi Jumlah Lulusan bersertifikat pef atih an oada tahun n dikali 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n-1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dibagi calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan Pelatihan		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang dilatih dibagi Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terdaftar dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.11	Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dibagi calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)			0	0	0	0	0	0	0	0	
	IKK OUTCOME											
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) dibagi Jumlah Tenaga Kerja dikali 100%	66,00316	7,16	6,70	7,00	66,00316	7,16	6,70	7,15	
	IKK OUTPUT											
3.1	Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas		Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n Jumlah dikali 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	Data Tingkat produktivitas Total		Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja	-100,73	92,3	-95,13	-93,30	-100,73	92,3	-95,13	6,67	
	IKK OUTCOME											
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi Jumlah Perusahaan pada tahun n Jumlah dikali 100	26,087	26,09	26,7	27,95	26,087	26,09	26,7	26,71	
4.1	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)		Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n dibagi Jumlah Perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10orang atau lebih dikali 100%	23,65	25	25,68	25,70	23,65	25	25,68	25,35	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n-1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n dibagi Jumlah Perusahaan yang memiliki SP/SB dikali 100%	53,33	47,06	47,10	47,10	53,33	47,06	47,10	30	
4.3	Rekapitulasi tahunan jumlah Konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan			20	22	26	26	20	22	26	26	
4.4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah		Jumlah Perusahaan yang sudah menyusun struktur PKB pada tahun n dibagi jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB dikali 100%	78,33	78,33	78,30	81,67	78,33	78,33	78,30	78,30	
4.5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan		Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dibagi Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor dikali 100%	69,57	69,57	70,2	70,80	69,57	69,57	70,2	70,2	
4.6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih		Jumlah Perusahaan yang berselisih dibagi jumlah Perusahaan pada tahun n dikali 100%	14,29	5,59	9,94	9,94	14,29	5,59	9,94	8,07	
4.7	Jumlah mogok kerja			0	0	0	0	0	0	0	0	
4.8	Jumlah penutupan Perusahaan			0	0	0	0	0	0	0	0	
4.9	Jumlah Perselisihan Kepentingan			0	0	1	0	0	0	1	1	
4.10	Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/PB) dalam 1 perusahaan			0	0		0	0	0		0	
4.11	Jumlah perselisihan PHK			3	11	12	11	3	11	13	18	
4.12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK			74	78	30	78	74	78	29	89	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n-1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.13	Jumlah Perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite			0	0	0	0	0	0	0	0	
4.14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan		ADA/TIDAK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4.15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial		Jumlah Perjanjian Bersama dibagi Jumlah kasus Perselisihan dikali 100%	65,22	58,33	62,50	62,50	65,22	58,33	62,50	76,19	
	IKK OUTCOME											
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar daerah) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah pencari yang terdaftar dikali 100%	37,30	70,59	15,96	16,00	37,30	70,59	15,96	5,20	
	IKK OUTPUT											
5.1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota			8	10	9	72	8	10	9	6	
5.2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dikab/kota			252	153	451	450	252	153	451	404	
5.3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayahkab/kota			3	3	3	3	3	3	3	3	
5.4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kabupaten/Kota			0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja			0	3	2	2	0	3	2	1	
5.6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota			0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n-1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota			159	234	49	72	159	234	49	87	
5.8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja(IPK) Online(SISNAKER)			0	0	0	0	0	0	0	0	
5.9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi		Jumlah CPMI /CTKI yang mendapatkan Sosialisasi dibagi Jumlah CPMI/CTKI dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		Jumlah CPMI /CTKI yang terdata dibagi Jumlah CPMI /CTKI dikali 100%	0	0	0	1	0	0	0	0	
5.11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan		Jumlah PMI /TKI yang dipulangkan dibagi Jumlah PMI yang pulang dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja		Jumlah PMI /TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja dibagi Jumlah PMI/TKI dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	URUSAN PERINDUSTRIAN											
	IKK OUTCOME											
1	Pertambahan Jumlah industri Kecil dan menengah di Kabupaten/Kota		Jumlah Industri Kecil dan menengah tahun n – Jumlah industri Kecil dan menengah tahun n-1 dibagi Jumlah Industri Kecil dan menengah tahun n-1 dikali 100%	15,74	12,11	15,90	15,93	15,74	12,11	15,90	16,14	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n-1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IKK OUTPUT											
1.1	Persentase jumlah penetapan Izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan Industri (IPKI) yang lokasi nya di daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Realisasi izin yang diterbitkan dibagi Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	IKK OUTCOME											
2.	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan industri termasuk Turunan Indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan RPIP			96,51	90,49	94,94	95,00	96,51	90,49	94,94	120,83	
	IKK OUTPUT											
2.1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA			62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	
	IKK OUTCOME											
3.	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi Jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100%	100	13,62	6,09	20,00	100	13,62	6,09	3,30	
	IKK OUTPUT											
3.2	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang diterbitkan		Jumlah realisasi izin yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk dikali 100%	100	94,26	89,42	90,00	100	94,26	89,42	95,05	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8			10	11		12
	IKK OUTCOME											
4.	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	IKK OUTPUT											
4.1	Persentase Jumlah izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang diterbitkan yang diterbitkan		Jumlah realisasi izin yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	IKK OUTCOME											
5.	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/Kota		Jumlah Izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	IKK OUTCOME											
6.	Tersedianya informasi Industri secara lengkap dan terkini			85	105	125	100	85	105	100	100	
	IKK OUTPUT											
6.1	Persentase data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/Kota		Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten Kota di SIINas dibagi total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri kecil di kabupaten kota di kali 100%	0,51	0,36	0,47	0,70	0,51	0,36	0,47	0,85	

o	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n-1)	
1	2	3	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PERDAGANGAN											
	IKK OUTCOME											
1.	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		Jumlah pelaku Usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan dibagi jumlah pelaku susha di wilayah kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	
	IKK OUTPUT											
1.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan											
	a. Pusat Perbelanjaan		Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja dibagi Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b. Toko Swalayan		Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja dibagi Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar dikali 100%	100	26,09	100	100	100	26,09	100	100	
1.2	Persentase Penerbitan TDG		Jumlah penerbitan TDG ≤ 5 hari kerja dibagi jumlah permohonan penerbitan TDG dikali 100%	100	100	10	100	100	100	100	100	
1.3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG		Jumlah Penerbitan TDG dibagi Jumlah Gudang yang ada di Kabupaten Kota	8,57	22,67	10,71	10,80	8,57	22,67	10,71	3,45	
1.4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk											
	a. Penerima Waralaba dari Waralaba dalam Negeri		Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar dibagi jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri dikali 100%	0	0	0	0	0		0	0	

No	Indikator	SPM/St ndar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thnn-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	b. Penerima Waralaba dari Waralaba lanjutan dari waralaba dalam Negeri		Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar dibagi jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c. Penerima Waralaba lanjutan dari Waralaba luar Negeri		Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar dibagi jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
.5	Persentase Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah kabupaten/Kota		Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten kota dibagi Jumlah permohonan SIUP bahan Berbahaya bagi pengecer dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Persentase Penerbitan SKA yang tepat waktu		Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1 x 24 jam) dibagi Jumlah permohonan Penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.7	Persentase Pengembangan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di wilayah kerjanya		$K = \frac{a}{b} \times 100\%$	24	24	75	75	24	24	75	75	
1.8	Persentase Koefisien Variasi harga antar waktu		Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	-0,27	0,198	0,88	0,89	-0,27	0,198	0,88	0,57	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n-1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IKK OUTCOME											
2.	Persentase kinerja Realisasi pupuk		Realisasi dibagi RDKK dikali 100%	23,719	25,38	28,04	28,04	23,719	25,38	28,04	77,40	
	IKK OUTPUT											
2.1.	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan		$X = a (b \times c) X 100\%$	0	0	28,04	28,04	0	0	28,04	77,40	
	IKK OUTCOME											
3.	Persentase alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		Jumlah UTTP yang bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan dibagi Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/Kota dikali 100%	42,487	49,68	77,78	78,00	42,487	49,68	77,78	62,41	
	IKK OUTPUT											
3.1	Persentase alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan		Jumlah Total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan dibagi Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	42,487	49,68	77,78	78,00	42,487	49,68	77,78	62,41	
3.2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		Jumlah Sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dibagi Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan diikli 100%	0	0	0	20,00	0	0	0	0	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Rendahnya Kompetensi dan Kualitas pencari kerja untuk memasuki pasar kerja;
2. Kurang harmonisnya Hubungan industrial ditempat kerja yang ditandai dengan tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan kasus perselisihan Hubungan Industrial;
3. Belum optimalnya tata kelola industri pengolahan;
4. Belum optimalnya pengembangan Kawasan industri dan Kawasan Peruntukkan industri;
5. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri;
6. Masih rendahnya kepatuhan Perusahaan Industri/Pelaku Usaha dalam kewajiban memiliki akun SIINas;
7. Masih belum optimalnya pengawasan barang dan jasa guna peningkatan perlindungan konsumen;
8. Belum maksimalnya sarana perdagangan yang memadai untuk menunjang perekonomian masyarakat;

Sedangkan terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, antara lain :

1. Keterbatasan anggaran dan SDM lingkup Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka;
2. Belum tersedianya Gedung BLK (Balai Latihan Kerja) di Kabupaten Bangka;
3. Kurang harmonisnya Hubungan industrial ditempat kerja yang ditandai dengan tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan kasus perselisihan Hubungan Industrial;
4. Masih Belum optimalnya tata kelola industri pengolahan;

5. Masih rendahnya kepatuhan Perusahaan Industri/Pelaku Usaha dalam kewajiban memiliki akun SIINas;
6. Masih rendahnya kepatuhan Perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri;
7. Masih belum optimalnya pengawasan barang dan jasa guna peningkatan perlindungan konsumen;
8. Belum maksimalnya sarana perdagangan yang memadai untuk menunjang perekonomian masyarakat;
9. Adanya kelangkaan pasokan beberapa barang kebutuhan pokok dan barang penting ditengah meningkatnya jumlah permintaan;
10. Lingkup layanan pengujian dan sertifikat yang masih sangat terbatas dikarenakan ketersediaan peralatan untuk pengembangan layanan terstandarisasi sangat terbatas;
11. Adanya kenaikan harga beberapa barang kebutuhan pokok dan barang penting ditengah meningkatnya jumlah permintaan.

Tantangan dan Peluang

Beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinakerperindag ke depan antara lain :

- Pentingnya peran Dinakerperindag Kabupaten Bangka yang didukung oleh peraturan yang berlaku;
- Menyiapkan tenaga terampil sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
- Menyiapkan informasi lapangan kerja dengan bekerjasama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Bangka dan memberikan pelatihan kepada Pencaker;
- Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai;
- Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi;
- Masih adanya tekanan-tekanan politik dalam pengambilan keputusan bidang perencanaan dan penganggaran sehingga mengganggu tahapan dan proses perencanaan pembangunan.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang yang dihadapi selama tahun 2024, maka strategi pada tahun 2025 yang berupa rekomendasi dan catatan untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK) beserta instrukturinya;
- b. Meningkatkan pelatihan calon pekerja berbasis kompetensi peluang usaha/pekerjaan yang dibutuhkan;
- c. Meningkatkan ketersediaan informasi lowongan pekerjaan melalui berbagai media yang dapat diakses dengan mudah;
- d. Menciptakan iklim usaha yang kondusif anatar pekerja dan Perusahaan;
- e. Meningkatkan sosialisasi kepada perusahaan agar patuh untuk menyampaikan data dan informasi industri melalui SIINAS;

- f. Meningkatkan pelatihan dan bimbingan teknis kepada IKM (Sertifikat Halal, HAACP dll) untuk meningkatkan Produk yang dihasilkan;
- g. Meningkatkan pelaksanaan operasi Pasar di Kabupaten Bangka dan monitoring pemantauan harga dan stok barang dan barang strategis lainnya;
- h. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Dinakerperindag. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD
Dinas tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025**

No	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Analisis Hasil Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				9.072.919.600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				9.072.919.600	
			Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	25,59	50.000.000			Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	25,59	50.000.000	
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11,12	40.000.000			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11,12	40.000.000	
			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	6.520.000.000			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	6.520.000.000	
			Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	64,55	113.000.000			Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	64,55	113.000.000	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4	1.754.919.600			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4	1.754.919.600	

			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100	595.000.000			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100	595.000.000	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	100	50.000.000			Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	100	50.000.000	
			Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100	40.000.000			Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100	40.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	50.000.000		Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	50.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Dokumen	40.000.000		Kab. Bangka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Dokumen	40.000.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100	6.520.000.000			Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100	6.520.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 orang (30 orang Laki-laki & 31 orang Perempuan)	6.500.000.000			Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 orang (30 orang Laki-laki & 31 orang Perempuan)	6.500.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.000.000			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.000.000	

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	42 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	42 Dokumen	10.000.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang menggunakan atribut lengkap	100	50.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang menggunakan atribut lengkap	100	50.000.000	
			Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100	3.000.000			Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100	3.000.000	
			Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50	60.000.000			Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50	60.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	50.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	50.000.000	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	3.000.000	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	3.000.000	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bangka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang (5 Laki-laki dan 5 Perempuan)	60.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bangka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang (5 Laki-laki dan 5 Perempuan)	60.000.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum di perangkat daerah	100	379.919.600	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum di perangkat daerah	100	379.919.600	

	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	369.919.600	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	369.919.600	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5.000.000	
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	5.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah	100	1.375.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah	100	1.375.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.100.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.100.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kab. Bangka	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	125.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kab. Bangka	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	125.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	150.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	150.000.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penambahan aset perangkat daerah	6,00	315.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penambahan aset perangkat daerah	6,00	315.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	235.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	235.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Bangka	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	40.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Bangka	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	40.000.000	

	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20 Unit	40.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20 Unit	40.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	-	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	-	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik daerah yng dipelihara	70	280.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik daerah yng dipelihara	70	280.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Mobil &13 Motor	200.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Mobil &13 Motor	200.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	35.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	35.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	45.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	45.000.000	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				20.000.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				20.000.000	
			Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	77	20.000.000			Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	77	20.000.000	
	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen RTKD yang disusun	1 Dokumen	20.000.000			Jumlah Dokumen RTKD yang disusun	1 Dokumen	20.000.000	

	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	10.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	10.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Bangka	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro	25 Orang	10.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Bangka	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro	25 Orang	10.000.000	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				270.000.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				270.000.000	
			Persentase Pencari Kerja yang kompeten	56	270.000.000			Persentase Pencari Kerja yang kompeten	56	270.000.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase Pencari kerja yang mengikuti Pelatihan	53,85	230.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase Pencari kerja yang mengikuti Pelatihan	53,85	230.000.000	
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Bangka	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	70 orang	180.000.000	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Bangka	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	70 orang	180.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 unit	50.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 unit	50.000.000	
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase LPKS yang dibina	100	20.000.000	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase LPKS yang dibina	100	20.000.000	
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Bangka	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	15 Lembaga	20.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Bangka	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	15 Lembaga	20.000.000	
	Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Persentase Perusahaan Kecil yang melakukan konsultasi produktivitas	15	20.000.000	Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Persentase Perusahaan Kecil yang melakukan konsultasi produktivitas	15	20.000.000	

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Bangka	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	15 Perusahaan	20.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Bangka	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	15 Perusahaan	20.000.000	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				150.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				150.000.000	
			Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	92	150.000.000			Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	92	150.000.000	
	Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AK/AKL	57,6	60.000.000	Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AK/AKL	57,6	60.000.000	
	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Kab. Bangka	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	75 orang	30.000.000	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Kab. Bangka	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	75 orang	30.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Bangka	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	15 orang	30.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Bangka	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	15 orang	30.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Informasi Lowongan Kerja yang diakses pencaker	29	90.000.000	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Informasi Lowongan Kerja yang diakses pencaker	29	90.000.000	
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Bangka	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (karir Hub)	60 Pencaker dan 10 pemberi Kerja	60.000.000	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Bangka	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (karir Hub)	60 Pencaker dan 10 pemberi Kerja	60.000.000	
	Sub Kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja	Kab. Bangka	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	30 Orang	30.000.000	Sub Kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja	Kab. Bangka	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	30 Orang	30.000.000	

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					180.000.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				180.000.000
			Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	47,77	180.000.000			Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	47,77	180.000.000
	Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota		Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	91,46	60.000.000	Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota		Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	91,46	60.000.000
	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Bangka	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online	10 Perusahaan	25.000.000	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Bangka	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online	10 Perusahaan	25.000.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Bangka	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartiti) dan pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan (20 Perusahaan)	35.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Bangka	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartiti) dan pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan (20 Perusahaan)	35.000.000

	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota		Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	62,5	120.000.000	Kegiatan pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota		Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	62,5	120.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	16 Perkara	40.000.000	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	16 Perkara	40.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Bangka	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	1 Asosiasi & 6 SP	20.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Bangka	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	1 Asosiasi & 6 SP	20.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	60.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	60.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	60.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	60.000.000	

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN					URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN					
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				425.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				425.000.000	
			Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk Pengembangan Produk IKM	0,70	425.000.000			Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk Pengembangan Produk IKM	0,70	425.000.000
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	25	425.000.000	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	25	425.000.000
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen rencana pembangunan industri	1 Dokumen	45.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen rencana pembangunan industri	1 Dokumen	45.000.000	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, dan Perwilayahan Industri	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan Industri.	1 Dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, dan Perwilayahan Industri	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan Industri.	1 Dokumen	30.000.000	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan peran serta Masyarakat.	Kab. Bangka	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.	1 Dokumen	350.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan peran serta Masyarakat.	Kab. Bangka	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.	1 Dokumen	350.000.000	

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				40.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				40.000.000	
			Persentase Izin Usaha Industri yang terintegrasi melalui SIINAS dan OSS	30	40.000.000			Persentase Izin Usaha Industri yang terintegrasi melalui SIINAS dan OSS	30	40.000.000
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kabupaten/Kota			Persentase Penerbitan Pemenuhan komitmen Izin Usaha industri	30	40.000.000	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kabupaten/Kota		Persentase Penerbitan Pemenuhan komitmen Izin Usaha industri	30	40.000.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	
Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan	Kab. Bangka	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian	1 Dokumen	20.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian	Kab. Bangka	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian	1 Dokumen	20.000.000	

	perizinan berusaha berbasis resiko melalui Sistem Informasi Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA).		dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui Sistem Informasi Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA).		dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				45.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				45.000.000
			Persentase Industri yang menyampaikan Informasi Industri melalui SIINAS	15	45.000.000			Persentase Industri yang menyampaikan Informasi Industri melalui SIINAS	15	45.000.000
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan kabupaten/Kota		Persentase Kelengkapan data perusahaan industri yang disampaikan melalui SIINAS	4	45.000.000	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan kabupaten/Kota		Persentase Kelengkapan data perusahaan industri yang disampaikan melalui SIINAS	4	45.000.000

	Sub Kegiatan Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data Industri, data kawasan industri serta data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 Dokumen	15.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data Industri, data kawasan industri serta data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 Dokumen	15.000.000	
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINAS	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan perusahaan kawasan industri Lingkup Kabupaten/kota dalam penyampaian Data Ke SIINAS	1 Dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINAS	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan perusahaan kawasan industri Lingkup Kabupaten/kota dalam penyampaian Data Ke SIINAS	1 Dokumen	30.000.000	
	URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN					URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN					
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				45.000.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				45.000.000	
			Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki izin perdagangan	75	45.000.000			Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki izin perdagangan	75	45.000.000	
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase Gudang yang memiliki Tanda Daftar Gudang	75	20.000.000	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase Gudang yang memiliki Tanda Daftar Gudang	75	20.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	20.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	20.000.000	

	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Persentase pelaku usaha yang memiliki izin perdagangan Minuman Beralkohol	30	10.000.000	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Persentase pelaku usaha yang memiliki izin perdagangan Minuman Beralkohol	30	10.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Kab. Bangka	Jumlah surat izin usaha perdagangan untuk pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Kab. Bangka	Jumlah surat izin usaha perdagangan untuk pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	10.000.000	
	Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya	40	15.000.000	Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya	40	15.000.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pegemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1 Jilid Laporan	15.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pegemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1 Jilid Laporan	15.000.000	

	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				3.180.000.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				3.180.000.000	
			Persentase Sarana distribusi yang direvitalisasi	70	3.180.000.000			Persentase Sarana distribusi yang direvitalisasi	70	3.180.000.000	
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	75	3.100.000.000	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	75	3.100.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Bangka	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	100.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Bangka	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	100.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Bangka	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	3.000.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Bangka	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	3.000.000.000	
	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase pembinaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100	80.000.000	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase pembinaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100	80.000.000	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Bangka	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	1 Dokumen	80.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Bangka	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	1 Dokumen	80.000.000	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				170.000.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				170.000.000	
			Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar	90	170.000.000			Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar	90	170.000.000	

	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting	90	100.000.000	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting	90	100.000.000	
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan 2 Dokumen	60.000.000	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan 2 Dokumen	60.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	5 laporan	40.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	5 laporan	40.000.000	
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida	75	70.000.000	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida	75	70.000.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Bangka	Jumlah laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	12 laporan	35.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Bangka	Jumlah laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	12 laporan	35.000.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Bangka	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	12 laporan	35.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Bangka	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	12 laporan	35.000.000	

	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				60.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				60.000.000	
			Persentase pelaku usaha yang mengikuti promosi dagang	100	60.000.000			Persentase pelaku usaha yang mengikuti promosi dagang	100	60.000.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang produk ekspor unggulan	100	60.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang produk ekspor unggulan	100	60.000.000	
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Kab. Bangka	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	7 Pelaku Usaha	60.000.000	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Kab. Bangka	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	7 Pelaku Usaha	60.000.000	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				95.000.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				95.000.000	
			Persentase Fasilitasi Promosi terhadap Pelaku usaha yang Menggunakan dan Memasarkan Produk Dalam Negeri	75	95.000.000			Persentase Fasilitasi Promosi terhadap Pelaku usaha yang Menggunakan dan Memasarkan Produk Dalam Negeri	75	95.000.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	75	95.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	75	95.000.000	

	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan, dan Jasa Akomodasi	50 UMKM	95.000.000	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan, dan Jasa Akomodasi	50 UMKM	95.000.000	
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				145.000.000	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				145.000.000	
			Persentase Alat standar tera/tera ulang yang dibutuhkan	39,29	145.000.000			Persentase Alat standar tera/tera ulang yang dibutuhkan	39,29	145.000.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	85,81	145.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	85,81	145.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Bangka	Jumlah Alat ukur, alat Takar, Alat timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1500 Unit	110.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Bangka	Jumlah Alat ukur, alat Takar, Alat timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1500 Unit	110.000.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan metrologi Legal	Kab. Bangka	Jumlah Pelaku Usaha di bidang Metrologi Legal yang dibina	500 orang	35.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan metrologi Legal	Kab. Bangka	Jumlah Pelaku Usaha di bidang Metrologi Legal yang dibina	500 orang	35.000.000	
	JUMLAH				13.897.919.600,00					13.897.919.600,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana Kerja didiskusikan dalam pembahasana forum OPD Kabupaten Bangka. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program dan kegiatan yang ditujukan kepada Dinakerperindag selaku OPD baik dari kelompok masyarakat dan Reses DPRD. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Adapun Program dan kegiatan yang diusulkan adalah :

Tabel 2.11

**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Bangka**

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Tahun 2025 adaah sebagai berikut :

Tema Pembangunan :

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan.

Tema RKP 2025 diwujudkan melalui 3 arah kebijakan prioritas pembangunan yaitu :

- SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
- Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hinggra reformasi pengelolaan sampah;
- Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinakerperindag yaitu Perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perindustrian serta perdagangan, Dinakerperindag Kabupaten Bangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 pada Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinakerperindag

Sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bangka yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 serta memperhatikan permasalahan dan tantangan, serta potensi dan peluang pembangunan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Bangka, maka tujuan tahun 2024-2026 yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor IKM;
3. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan;
4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Adapun sasaran dirumuskan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah;
2. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB;
3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- 1 (2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka		Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	5,17

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- 1 (2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	68,39
2.	Meningkatkan pertumbuhan sektor IKM		Persentase Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan	12,69
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	24,47
3.	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan		Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	7,77
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,54
4.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Informasi Birokrasi Perangkat Daerah	33,37
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (74,75)

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka melaksanakan 3 (tiga) Urusan yaitu Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Perindustrian dan urusan Perdagangan.

Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan ini disusun dengan menyesuaikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2003 dan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D) dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Kabupaten Bangka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 99 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 100);

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
 1. Penyesuaian Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
 2. Penyesuaian terhadap Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021
 3. Penyesuaian Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2003.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan Kegiatan, antara lain meliputi :
 1. Terdapat 14 Program yang akan dilaksanakan pada rencana kerja tahun 2025;
 2. Terdapat 28 kegiatan yang masing-masing mendukung program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025;
 3. Terdapat 57 Sub Kegiatan yang masing-masing mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025;
 4. Total pagu kebutuhan dana/pagu dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum tahun 2025 sebesar Rp. 13.897.919.600,00;
 5. Lokasi pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Bangka.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan perangkat Daerah berisi rumusan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinakerperindag Kabupaten Bangka disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengalokasian sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya, Dinakerperindag Kabupaten Bangka direncanakan Tahun Anggaran 2025 ada 14 (Empat belas) Program, 28 (Dua puluh delapan) Kegiatan dan 57 (Lima puluh tujuh) Sub Kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
2. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
3. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

d. Kegiatan Administrasi Umum

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
2. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
3. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
4. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro;
2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.

III. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

1. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi;
2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

1. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil.

IV. Program Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja;
2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.

Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;
2. Sub Kegiatan Job Fair/bursa kerja.

V. Program Hubungan Industrial

Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan;
2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.

Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Bangka;
2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non afiliasi;
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

VI. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;

2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan dan perwilayahan Industri;
3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

VII. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasikan dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasikan secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, IPKI Kewenangan Kabupaten/kota.

VIII. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data Industri, data kawasan industri serta data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);
2. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINAS.

IX. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang.

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C.

Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

1. Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2).

X. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah kerjanya

1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

XI. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang

Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota;
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi;
2. Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

XII. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal

XIII. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

1. Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota;
2. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

XIV. Program Standarisasi Perlindungan Konsumen

Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang;
2. Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.

Secara keseluruhan guna melaksanakan program dan kegiatan Dinakerperindag Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 direncanakan kebutuhan dana/pagu indikatif disajikan dalam tabel berikut ini :

2	07	01	2.05	9999	Rekrutmen dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi														
						Jumlah Pegawai Berlisensi Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang (15 laki-laki & 15 orang perempuan) Orang			10 Orang (5 laki & 5 PI)	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinakerperindag	10 orang 15 laki-laki & 5 orang perempuan) Orang	60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pencapaian Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di perangkat daerah	100%		100 %		279.134.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinakerperindag	100%	279.134.100,00	
2	07	01	2.06	9999	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 laporan		12 Laporan		269.610.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinakerperindag	12 Laporan	279.134.100,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	07	01	2.06	9999	Pemutakhiran Acip Dinamis pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Pemutakhiran Acip Dinamis pada SKPD	56 Dokumen		12 Dokumen		5.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Begung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinakerperindag	12 Dokumen	5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	07	01	2.06	9999	Bukuinger Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	26 Dokumen		12 Dokumen		5.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Begung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinakerperindag	12 Dokumen	5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	07	01	2.07		Pengadaan Karang Muli Daerah Perancang Urusan Pemerintah Daerah	Pencapaian Pemenuhan aset perangkat daerah	6,30%		6,00%		225.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinakerperindag	6,30%	225.000.000,00	
2	07	01	2.07	9999	Pengadaan Kondakan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Unit Kondakan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibudikan	2 Unit		1 Unit		250.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Begung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinakerperindag	1 Unit	225.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2	BT	01	2.87	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	60.000.000,00	Kab. Bangko, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinakerperindag	1 Unit	60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	BT	01	2.87	0006	Pengadaan Perakitan dan Mebel Lainnya	Jumlah Unit Perakitan dan Mebel Lainnya yang Disediakan	70 unit			29 Unit	60.000.000,00	Kab. Bangko, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinakerperindag	29 Unit	60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	BT	01	2.88		Penyediaan jasa Pemukiman Rerumputan Urusan	Persentase Pemukiman Rerumputan yang di Peningkat Daerah	100%			100 %	1.575.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinakerperindag	100%	1.580.000.000,00	
2	BT	01	2.88	0001	Penyediaan jasa surut Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surut Menyurat	36 Laporan			12 Laporan	1.100.000.000,00	Kab. Bangko, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinakerperindag	12 Laporan	1.100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	BT	01	2.88	0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan			13 Laporan	325.000.000,00	Kab. Bangko, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinakerperindag	13 Laporan	330.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	BT	01	2.88	0004	Penyediaan jasa Pelayanan Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Bangko, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinakerperindag	12 Laporan	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang dipelihara	75%			70%	328.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Dambangunan Pemerintah) Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinakerperindag	75%	350.000.000,00	
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 (4 Mobil dan 13 Motor) Unit			4 Mobil dan 13 Motor Unit		241.000.000,00	Kab. Bangko, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinakerperindag	17 (4 Mobil dan 13 Motor) Unit	300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya														
					Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	30 Unit			30 Unit		35.000.000,00	Kab. Bangko, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinakerperindag	30 Unit	35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit			1 Unit		30.000.000,00	Kab. Bangko, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinakerperindag	1 Unit	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	2	07	02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	77%		77%		20.000.000,00						77%	20.000.000,00	
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTKD yang disusun	1Dokumen		1 Dokumen		20.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Dinakerperindag ,Perusahaan	1Dokumen	20.000.000,00	

2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	3 Dokumen		1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bangko, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Dinakerperindag, Perusahaan	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7	07	02	2.01	0005	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTM Mikro	79 Orang		23 Orang	10.000.000,00	Kab. Bangko, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Dinakerperindag, Perusahaan	30 Orang	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	2	07	05		PROGRAM PELATIHAN KSBK DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang kompeten	50,00 %		50,00 %	270.000.000,00						50,00 %	270.000.000,00	
2	07	02	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari kerja yang mengikuti Pelatihan	57,14%		53,85 %	230.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pencaker	57,14%	230.000.000,00	
2	07	05	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan kluster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	210 Orang		70 Orang	180.000.000,00	Kab. Bangko, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pencaker	80 Orang	180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	07	05	2.01	0005	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 UNIT		1 UNIT	50.000.000,00	Kab. Bangko, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pencaker	1 UNIT	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	07	05	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang dibina	100%		100 %	20.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100%	20.000.000,00	

1	BT	63	2.82	0000	Dibinaan Lembaga Pelatihan Kerja Terpadu	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga		10 Lembaga	20.000.000,00	Kab. Bangk. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALIYAH UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10 Lembaga	20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	BT	64	2.84		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan Kecil yang melakukan konsultasi produktivitas	15%		15 %	20.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Perusahaan	20%	20.000.000,00	
3	BT	64	2.84	0000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan kecil	Jumlah Perusahaan kecil yang Menjalani Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan		10 Perusahaan	20.000.000,00	Kab. Bangk. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALIYAH UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Perusahaan	10 Perusahaan	20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4	2	BT	64		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	92 %		92 %	150.000.000,00						92 %	150.000.000,00	
1	BT	64	2.86		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan DK/ASK	97,18%		97,18 %	60.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pencakar, Pencakar Disabilitas	97,18%	60.000.000,00	
2	BT	64	2.86	0000	Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui Layanan DKAD dan AJKL	120 orang		70 orang	20.000.000,00	Kab. Bangk. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALIYAH UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pencakar, Pencakar Disabilitas	80 orang	20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	BT	64	2.86	0004	Penyenggaraan Unit Layanan Disabilitas Kebangsaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	10 orang		10 orang	20.000.000,00	Kab. Bangk. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALIYAH UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pencakar, Pencakar Disabilitas	10 orang	20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	BT	64	2.88		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang diakses pemakai	10%		20 %	80.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pencakar dan Pemberi Kerja	10%	80.000.000,00	
2	BT	64	2.88	0000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan Pemberi kerja yang Terdaftar dalam Pasar kerja Melalui sistem Online (Kari Hub)	180 pencari dan 30 pemberi kerja Orang		60 dan 10 Orang	60.000.000,00	Kab. Bangk. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALIYAH UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pencakar dan Pemberi Kerja	70 pencari dan 15 pemberi kerja Orang	60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2	07	04	2.03	0003	Jasa Fair/Bursa Kerja	Jumlah Peserta Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Jasa Fair/Bursa Kerja	90 Orang			90 Orang	30.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pengusaha dan Pemberi Kerja	48 Orang	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	2	07	03		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Perentase Perusahaan yang menepatkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	47,77%			47,77%	180.000.000,00						47,77%	180.000.000,00	
2	07	03	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	89,25%			89,25%	60.000.000,00			Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pengusaha dan Pekerja Buruh	89,25%	60.000.000,00	
2	07	05	2.01	0004	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terikat dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WPKP Online	20 Perusahaan			20 Perusahaan	25.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pengusaha dan Pekerja Buruh	20 Perusahaan	25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	07	05	2.01	0005	Penyertenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Penguasaan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta menguasainya	1 Laporan (20 perusahaan) Laporan			1 (20 Perusahaan) Laporan	25.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pengusaha dan Pekerja Buruh	1 Laporan (20 perusahaan) Laporan	25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	07	03	2.02		Pengawasan dan Penyelidikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Pemutusan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Perentase kasus Penyelesaian Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	62,5%			62,5%	120.000.000,00			Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pengusaha dan Pekerja Buruh	62,5%	120.000.000,00	
2	07	03	2.02	0002	Penyelidikan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berisiko/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang diselesaikan	40 Perkara			40 Perkara	40.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pengusaha dan Pekerja Buruh	40 Perkara	40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2	07	05	2.02	6663	Peningkatan Verifikasi dan Kelengkapan Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi													
					Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	3 Asosiasi & 18 SP Asosiasi dan Serikat Pekerja			1 dan 6 Asosiasi dan Serikat Pekerja	20.000.000,00	Kab. Bangsa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pengusaha dan Pekerja Buruh	3 Asosiasi & 18 SP Asosiasi dan Serikat Pekerja	20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	07	05	2.02	6664	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota													
					Jumlah LES tripartit yang Dilaksanakan	3 lembaga			1 Lembaga	80.000.000,00	Kab. Bangsa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pengusaha dan Pekerja Buruh	1 Lembaga	80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					4.205.000.000,00							4.205.000.000,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.685.000.000,00							1.685.000.000,00	
4	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki izin perizinan	75 %		75 %	45.000.000,00						75 %	45.000.000,00	
2	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Gudang yang memiliki Tanda Daftar Gudang	90%		75 %	20.000.000,00			Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku Usaha Perdagangan	90%	20.000.000,00	
2	30	02	2.02	6661	Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang													
					Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bangsa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku Usaha Perdagangan	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin perdagangan Minuman Beralkohol	30%		10 %	10.000.000,00			Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku Usaha Perdagangan	30%	10.000.000,00	
2	30	02	2.05	6661	Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C													
					Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diberikan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bangsa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku Usaha Perdagangan	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

5	30	02	2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persepsi Fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya	40%		90 %	15.000.000,00					Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Belaku Usaha Perdagangan	40%	15.000.000,00	
6	30	02	2.06	0001	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produksi B2 (P-B2)													
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distribusi B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produksi B2 (P-B2)	5 Laporan		1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Bangk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM, DANA ALOKASI UMUM			Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Belaku Usaha Perdagangan	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7	3	50	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persepsi Sarana distribusi yang direvitalisasi	70 %	70 %	5.180.000.000,00							70 %	5.180.000.000,00	
8	30	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persepsi pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	87,5%		75 %	8.130.000.000,00			Mempertukur Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Belaku Usaha Perdagangan	87,5%	8.130.000.000,00		
9	30	03	2.01	0001	Pembinaan sarana Distribusi Perdagangan													
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 unit		1 (pasat reggati) unit	200.000.000,00	Kab. Bangk, semua Kecamatan, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM, DANA ALOKASI UMUM	Mempertukur Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Belaku Usaha Perdagangan	1 Unit	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
9	30	03	2.01	0002	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan													
					Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 unit		1 unit	2.538.000.000,00	Kab. Bangk, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM, DANA ALOKASI UMUM	Mempertukur Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Belaku Usaha Perdagangan	1 Unit	2.538.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
9	30	03	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persepsi pembinaan pengelola sarana distribusi pedagang	100%		100 %	60.000.000,00			Mempertukur Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Belaku Usaha Perdagangan	100%	60.000.000,00		
9	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan													
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 Dokumen		1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Bangk, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM, DANA ALOKASI UMUM	Mempertukur Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Belaku Usaha Perdagangan	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

5	50	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar	50 %			50 %	170.000.000,00					50 %	100.000.000,00		
5	50	04	1.02		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting	95%			90%	100.000.000,00		Mempertuak Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku usaha Perdagangan	95%	90.000.000,00		
5	50	04	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/kota														
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	36 Laporan			12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Bangko, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER LUNJUM-DANA ALOKASI UNJUM	Mempertuak Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku usaha Perdagangan	12 Laporan	60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5	50	04	1.02	0005	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/kota														
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	15 Laporan			5 Laporan	40.000.000,00	Kab. Bangko, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER LUNJUM-DANA ALOKASI UNJUM	Mempertuak Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku usaha Perdagangan	5 Laporan	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5	50	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida	80%			75 %	70.000.000,00			Mempertuak Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku usaha Perdagangan	80%	70.000.000,00	
5	50	04	1.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
						Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	36 Laporan			12 Laporan	55.000.000,00	Kab. Bangko, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER LUNJUM-DANA ALOKASI UNJUM	Mempertuak Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku usaha Perdagangan	12 Laporan	55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2	50	54	2.03	0001	Pengawasan Penyairahan dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Berubstidi	Jumlah Laporan Pengawasan penyairahan dan penggunaan Pupuk dan Pestisida Berubstidi dengan Realisasi Minimal 90%	36 Laporan			33 Laporan	25.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi: Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku usaha Perdagangan	33 Laporan	25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
9	5	50	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha yang mengikuti promosi dagang	100%			100%	60.000.000,00						100%	60.000.000,00		
2	40	65	2.01		Penyediaan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Mini Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Persentase pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang produk ekspor unggulan	100%			100%	60.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi: Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku usaha Perdagangan	100%	60.000.000,00		
9	40	68	2.01	0001	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	25 Pelaku usaha			27 Pelaku Usaha	60.000.000,00	semua Kota/kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi: Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku usaha Perdagangan	2 Pelaku Usaha	60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
30	5	30	08		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat standar tera/tera ulang	39,29%			39,29%	145.000.000,00							39,29%	145.000.000,00	
4	30	56	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTP yang ditera/tera ulang	84,81%			85,81%	105.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi: Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku usaha Perdagangan	84,81%	105.000.000,00		
3	30	56	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan alat perlengkapan tera/tera ulang	1050 Unit			1500 Unit	110.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi: Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku usaha Perdagangan	1050 Unit	110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
5	30	56	2.01	0002	Pengawasan/Pemeliharaan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	500 Orang			500 Orang	25.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi: Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku usaha Perdagangan	500 Orang	25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

11	3	30	07		PROGRAM PEMERIKSAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitas Promosi terhadap Pelaku Usaha yang Menggunakan dan Memasarkan Produk Dalam Negeri	75 %		75 %	55.000.000,00						75 %	55.000.000,00		
9	10	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	75%		75 %	55.000.000,00			Mempromotif ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan ekonomi penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku Usaha Perdagangan	75%	55.000.000,00		
9	10	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan ritel, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	150 UMKM		50 UMKM	55.000.000,00	Kab. Bangk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM, DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan ekonomi penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku Usaha Perdagangan	50 UMKM	55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
4	41				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN														
										526.000.000,00							526.000.000,00		
12	4	11	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk Pengembangan Produk IKM	0,70 %		0,70 %	425.000.000,00							0,70 %	425.000.000,00	
1	11	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	30%		25 %	425.000.000,00			Mempromotif ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan ekonomi penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku Usaha Industri	30%	425.000.000,00		
2	11	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Bangk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM, DANA ALOKASI UMUM	Mempromotif ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan ekonomi penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku Usaha Industri	1 Dokumen	45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	11	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Percepatan dan Penyeragaman Industri														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyeragaman dan Penyeragaman Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bangk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM, DANA ALOKASI UMUM	Mempromotif ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan ekonomi penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku Usaha Industri	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat													
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen			1 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Bangk. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku Usaha Industri	1 Dokumen	350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
13	3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang terintegrasi melalui SINAS dan OSS	30%		30%	40.000.000,00						30%	40.000.000,00	
1	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Peremehan komitmen Izin Usaha Industri	40%		30%	40.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku Usaha Industri	40%	40.000.000,00	
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota													
					Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bangk. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku Usaha Industri	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3	31	03	2.01	0004	Kegiatan verifikasi membandingkan penyicatan standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian pendanaan berwujud di kawasan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission (SOS) Data Approach (OSS RBA)													
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi membandingkan penyicatan standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian pendanaan berwujud di kawasan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission (SOS) Data Approach (OSS RBA) bagi Perusahaan Kecil dan Nagari (PKDN) dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah, selain bidang usaha pertanian yang menjadi fokus kegiatan OSS RBA	3 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Keb. Dangkal, Sema Kecamatan, Sema Kabupaten Kulawi	DANA FUNDING UMUM-DANA SUBSIDI UMUM	Mam perkait Kabupaten Dangkal Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Pengujian sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku Usaha Industri	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
14	1	03	03		PROYEKSI PERDULSIAN SOFTSIA INFORMASIONAL (Nasional)				10%	45.000.000,00					10%	45.000.000,00		
					Persentase kelengkapan data perusahaan industri yang di sampaikan melalui SII NAS	5%		4%	45.000.000,00			Mam perkait Kabupaten Dangkal Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Pengujian sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku Usaha Industri	5%	45.000.000,00		
3	31	03	2.01	0005	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain lengkap (Industri/ Kota/ Desa) Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas)													
					Jumlah Dokumen (sdi) Kualitatif Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain (lengkap Kabupaten/ Kota/ Desa) Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas)	3 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	Keb. Dangkal, Sema Kecamatan, Sema Kabupaten Kulawi	DANA FUNDING UMUM-DANA SUBSIDI UMUM	Mam perkait Kabupaten Dangkal Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Pengujian sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku Usaha Industri	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	03	2.01	0006	Persentase dan Evaluasi, Kelayakan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri (lengkap Kabupaten/ Kota/ Desa) Penyempurnaan Data ke SII Nas													
					Jumlah Dokumen (sdi) Persentase dan Evaluasi Kelayakan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri (lengkap Kabupaten/ Kota/ Desa) Penyempurnaan data ke SII Nas	3 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Keb. Dangkal, Sema Kecamatan, Sema Kabupaten Kulawi	Mam perkait Kabupaten Dangkal Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Pengujian sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku Usaha Industri	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
									JUMLAH	11.897.910.400,00						18.051.114.394,00		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi Renja tahun berjalan serta mengacu kepada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025. Kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 disusun mengacu kepada Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 yang selanjutnya dimutakhirkan dengan kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur untuk perencanaan dan penganggaran berdasarkan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 memuat rencana operasional pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 melalui pelaksanaan 1 (satu) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 2 (dua) Urusan Pemerintahan Pilihan dengan total pagu anggaran mencapai Rp. 13.897.919.600,00 (Tiga belas milyar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah).

Catatan penting yang patut mendapat perhatian dalam Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah Adanya pemilihan Bupati dan wakil Bupati pada tahun 2024 yang mengharuskan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan untuk memastikan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan sesuai ketentuan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan serta mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan, maka kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 dengan efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
2. Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 merupakan langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2025, dimana selanjutnya Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka wajib melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 secara berkala, melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan secara berkala;
4. Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Tindak Lanjut atas Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 mencakup:

1. Penyusunan Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 dengan mengacu kepada Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025;
2. Persiapan pelaksanaan Renja hingga pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangka.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sungailiat, Juli 2024

Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Perindustrian dan
Perdagangan
Kabupaten Bangka,



Drs. H. ASEP SETIAWAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670504 199403 1 013



BUPATI BANGKA

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/ 1376 /BAPPEDA/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Keputusan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22 Seri D);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
 - a. mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
 - c. menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, mulai dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai pada Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. penanggung Jawab bertugas memastikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tepat waktu dan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan
 - c. sekretaris bertugas melakukan pemeriksaan dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan

- d. anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta menyetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bangka.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Penanggung Jawab Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Desember 2023

Pj. BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
 NOMOR : 100.3.3.2/1376/BAPPEDA/2023
 TANGGAL : 8 DESEMBER 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

I. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka	Penanggung Jawab
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Ketua
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Pranata Komputer Terampil pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka/Dwi Afriyanti, A.Md	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan /Sugianto, SE	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Adm.Perekonomian/ Nurleily, S.A.P.	Anggota
7.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/Adi Warman, SE.	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Adm.Kesra dan Kemasyarakatan/ Marisa, S.I.P.	Anggota
9.	Analisis SDMA pada Bagian Umum dan Rumah Tangga/ Syaipudin, S.I.P.	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Keprotokolan/ Elisnawati, S.AP	Anggota
11.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Ahmad Syahrudin, S.I.P.	Anggota
12.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum dan HAM/ Hivia Sari Dewi, S.H.	Anggota
13.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi/Fadya Nafaila, SH	Anggota

II. SEKRETARIAT DPRD

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris DPRD	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Kepala Bagian Umum	Anggota
6.	Pelembaga pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota

III. INSPEKTORAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Insepktorat	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Irban Bidang Pemerintahan	Anggota
5.	Irban Bidang Investigasi	Anggota
6.	Irban Bidang Ekonomi dan Keuangan	Anggota
7.	Irban Bidang Pembangunan	Anggota
8.	Irban Bidang Aparatur dan Kesra	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat	Anggota

IV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
6.	Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi	Anggota
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Perencana pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
9.	Perencana pada Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
10.	Perencana pada Bidang Sosial dan Ekonomi	Anggota
11.	Perencana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
12.	Statistisi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
13.	Analisis Kebijakan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
14.	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Sekretariat	Anggota

V. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah	Anggota
10.	Pelaksana pada Sekeratiat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

VI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM	Anggota
7.	Analisis Perencanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
8.	Pengadministrasi Surat Menyurat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota

VII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Anggota
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

VIII. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Penanggung Jawab
2.	Sekeratris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekeratriat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota

IX. DINAS KESEHATAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	Sekeratris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota

X. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi	Anggota
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
7.	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

XI. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
4.	Kapala Bidang Perumahan	Anggota
5.	Kapala Bidang Permukiman	Anggota
6.	Kapala Bidang Pertanahan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

XII. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Personil	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
10.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
11.	Pelaksana pada Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
12.	Pelaksana pada Bagian Keuangan	Anggota

XIII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Anggota
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
6.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota

XIV. DINAS SOSIAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sosial	Anggota

XV. DINAS TENAGA KERJA, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
7.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota

XVI. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana Ketahanan, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

XVII. DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pangan dan Pertanian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5.	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
6.	Kepala Bidang Prasarana Sarana Penyuluhan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
10.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	Anggota

XVIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Perencana pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

XIX. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perhubungan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Anggota

XX. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

XXI. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi	Anggota
5.	Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa	Anggota
6.	Kepala Bidang Fasilitasi Administrasi Pemerintah Desa	Anggota
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

XXII. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5.	Kepala Bidang E-Government	Anggota
6.	Kepala Bidang Persandian	Anggota
7.	Kepala Bidang Statistik	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekeratriat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota

XXIII. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN, KOPERASI DAN UKM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penanaman Modal	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan	Anggota
7.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Anggota

XXIV. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota
6.	Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan	Anggota
7.	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
8.	Pustakawan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota

XXV. DINAS PERIKANAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perikanan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perikanan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
5.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengolah dan Pemasaran	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengawasan Hasil Perikanan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan / Mirzaban, S.Pi	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan / Ayu Annisa Fitri, S.Tr.Pi	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan / Achmad Maulana	Anggota

XXVI. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua
3.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya	Anggota
6.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota

XXVII. KECAMATAN SUNGAILIAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Sungailiat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Sungailiat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXVIII. KECAMATAN PEMALI

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Pemali	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Pemali	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXIX. KECAMATAN MERAWANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Merawang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Merawang	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXX. KECAMATAN PUDING BESAR

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Puding Besar	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Puding Besar	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXI. KECAMATAN BAKAM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Bakam	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Bakam	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXII. KECAMATAN MENDO BARAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Mendo Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Mendo Barat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIII. KECAMATAN RIAU SILIP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Riau Silip	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Riau Silip	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIV. KECAMATAN BELINYU

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Belinyu	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Belinyu	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Desember 2023

Pj. BUPATI BANGKA,

M. HARIS AR



(Handwritten signature in blue ink)